



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 39 TAHUN 2023**

**TENTANG
INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif, dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri Nomor AR.01.1/1/418.39/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Permohonan Penetapan Peraturan Bupati Kediri tentang Kode Klasifikasi, JRA dan SKKAD serta Berita Acara Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis (Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Nomor AR.01.2/425/418.39/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 perlu mengatur tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis;

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Kode Wilayah Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi.
12. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
13. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
14. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
16. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

17. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif.
18. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif.
19. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
20. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
21. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
22. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
23. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawabannya sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
24. Akses arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
25. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
26. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.

27. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
28. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
29. Tingkat klasifikasi keamanan akses arsip dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
31. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
32. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
33. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis yang di dalamnya terlampir Kode Klasifikasi, JRA dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini bertujuan :

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan kode klasifikasi, penentuan hak akses dan keamanan serta penentuan masa simpan arsip dalam keseluruhan proses pengelolaan arsip;
- b. terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip;

- c. sebagai sumber informasi pengelolaan arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Klasifikasi Arsip;
- b. JRA;
- c. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
- d. Unit Pengolah.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip, JRA, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi :
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksana tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan lain.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kode Klasifikasi berupa angka (*numeric*).
- (3) Kode Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip.
- (4) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 6

- (1) JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 56 (lima puluh enam) urusan.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan.
- (4) Ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - b. Retensi Arsip dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (4) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
 - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

BAB V

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 8

- (1) Kategori Klasifikasi keamanan arsip dinamis dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat informasi yaitu:
 - a. sangat rahasia;
 - b. rahasia;
 - c. terbatas; dan
 - d. biasa/terbuka.
- (2) Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu klasifikasi informasi yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan bangsa.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan, serta kerugian finansial yang signifikan.
- (5) Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 9

Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan berdasarkan:

- a. ketentuan hukum;
- b. analisis fungsi unit kerja dan uraian jabatan (*job description*); dan
- c. analisis risiko.

Bagian Kedua
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis

Pasal 10

- (1) Hak Akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat eselon II;
 - b. pejabat eselon III/administrator/jabatan yang setara dengan eselon III; dan
 - c. pejabat eselon IV/pengawas/jabatan yang setara dengan eselon IV.

Pasal 11

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penentu Kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Daerah/Instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
 2. Pimpinan tingkat tinggi, yaitu sekretaris, Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. Pimpinan tingkat, yaitu Kepala Sub Bidang, atau Sub Koordinator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya, kecuali sudah mendapatkan izin.

- b. Pelaksana Kebijakan, yaitu staf, fungsional umum atau tertentu, pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses dengan Arsip dengan tingkat klasifikasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, yang terdapat pada Pimpinan Tingkat Tertinggi, Pimpinan Tingkat Tinggi, Pimpinan Tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapat izin; dan
 - c. Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
- a. Publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. Aparat Penegak Hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara/proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
UNIT PENGOLAH

Pasal 13

Unit Pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 - 9 - 2023

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 - 9 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

**KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN KEDIRI**

000	UMUM
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1.1	Telekomunikasi
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)
000.1.5	Rapat Pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)
000.1.6	Penyediaan Konsumsi
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
000.1.7.1	Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas
000.1.7.2	Pemeliharaan dan Perbaikan
000.1.7.3	Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
000.1.8.2	Penghijauan
000.1.8.3	Perbaikan Gedung
000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
000.2	PERLENGKAPAN
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.1	Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.2	Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.2	Pemeliharaan Peralatan Kantor
000.2.2.1	Data Hasil Pemeliharaan Kantor
000.2.2.2	Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor
000.2.3	Distribusi
000.2.3.1	Barang Habis Pakai
000.2.3.2	Barang Milik Daerah

- 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk didalamnya Proses Lelang Penghapusan)
- 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
- 000.3 PENGADAAN**
- 000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
- 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak)
- 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak)
- 000.3.4 Swakelola (antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi)
- 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: *Data Base* Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, *Data Base* kontrak, *Data Base* Pengadaan Barang/Jasa)
- 000.3.6 Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi)
- 000.4 PERPUSTAKAAN**
- 000.4.1 Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
 - 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
 - 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
 - 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
- 000.4.3 Koleksi Pustaka
 - 000.4.3.1 Pembelian
 - 000.4.3.2 Hibah
 - 000.4.3.3 Hadiah
 - 000.4.3.4 Tukar Menukar
 - 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
 - 000.4.3.6 Terbitan Internal
 - 000.4.3.7 Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus
 - 000.4.3.8 Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)
- 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
- 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
- 000.4.6 Layanan Perpustakaan
 - 000.4.6.1 Keanggotaan
 - 000.4.6.2 Peminjaman
 - 000.4.6.3 Pengembangan Gemar Baca
- 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
 - 000.4.7.1 MoU
 - 000.4.7.2 Perjanjian Kerjasama
 - 000.4.7.3 Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional
- 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
 - 000.4.8.1 Pengembangan Situs Web
 - 000.4.8.2 Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia
 - 000.4.8.3 Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan
 - 000.4.8.4 Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital
- 000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
- 000.4.10 Konservasi
 - 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan

- 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 000.4.12 Transformasi Digital
- 000.4.13 Kurasi Digital
- 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
 - 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
 - 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
 - 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
 - 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 000.5 KEARSIPAN**
 - 000.5.1 Kebijakan di Bidang Kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
 - 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
 - 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
 - 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
 - 000.5.2.5 *Data Base* Arsiparis
 - 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
 - 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
 - 000.5.2.8 *Data Base* Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
 - 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
 - 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
 - 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
 - 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
 - 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
 - 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
 - 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)
 - 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
 - 000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)
 - 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
 - 000.5.6 Penyusutan Arsip
 - 000.5.6.1 Peminjaman Arsip (antara lain: Berita Acara Peminjaman, Daftar Arsip yang dipinjamkan)
 - 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan)
 - 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan Panitia Penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
 - 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Alih Mediakan)
 - 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

- 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
 - 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip , Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
 - 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
 - 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain sesuai Perkembangan TI) dan Transkrip)
 - 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis)
 - 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, Guide)
 - 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)
 - 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
 - 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
 - 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber)
- 000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain: Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip)
- 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.5.12 Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana
- 000.5.13 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.5.14 Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup
- 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
 - 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
 - 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
 - 000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN

- 000.6.1 Kebijakan di Bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.6.2 Pengamanan Persandian
 - 000.6.2.1 Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto
 - 000.6.2.2 Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto
 - 000.6.2.3 Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan
- 000.6.3 Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
 - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
 - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
 - 000.6.3.3 Pelaksanaan
 - 000.6.3.4 Pelaporan
- 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
- 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
 - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
 - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 000.6.5.7 Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
 - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional

- 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
- 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
- 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
- 000.7.1.6 Musrenbang Desa
- 000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
 - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
 - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
 - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
 - 000.7.2.8 Laporan Berkala
 - 000.7.2.9 Laporan Insidental
 - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
 - 000.7.6.1 Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah
 - 000.7.6.2 Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah
 - 000.7.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
 - 000.7.6.4 Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah
 - 000.7.6.5 Penerapan Perencanaan Aksi Strategi Daerah
- 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
 - 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
 - 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
 - 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
 - 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
 - 000.7.7.5 Pendanaan *On Top* atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 000.8.1 Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - 000.8.1.1 Pembentukan
 - 000.8.1.2 Pengubahan
 - 000.8.1.3 Pembubaran
- 000.8.2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
 - 000.8.2.1 Analisa Jabatan
 - 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
- 000.8.3 Ketatalaksanaan
 - 000.8.3.1 Proses Bisnis
 - 000.8.3.2 Standar Pelayanan
 - 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
 - 000.8.3.4 Pelayanan Publik
- 000.8.4 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
- 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
- 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
 - 000.8.6.1 Budaya Kerja
 - 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 - 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

- 000.9.1 Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)
- 000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
- 000.9.4 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
- 000.9.5 Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 000.9.6 Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 000.9.6.1 Data
 - 000.9.6.2 Statistik
 - 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
- 000.9.7 *Master Proceeding* /Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
 - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
 - 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
- 100.1.5 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.5.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 100.1.5.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 100.1.5.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
- 100.1.6 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

- 100.2.1 Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
 - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
 - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
 - 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
 - 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
 - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
 - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
 - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
 - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM

- 100.3.1 Program Legislasi
 - 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah

	100.3.1.2	Program Legislasi
100.3.2		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain: Rancangan Peraturan Daerah, termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai diundangkan)
100.3.3		Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
100.3.4		Instruksi/Surat Edaran
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II dan III
100.3.5		Surat Perintah
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II dan III
100.3.6		Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
100.3.7		Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8		Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
100.3.9		Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10		Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
100.3.11		Kasus/Sengketa Hukum
	100.3.11.1	Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/Sengketa Perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12		Perijinan
100.3.13		Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14		Permohonan HaKI yang ditolak□

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200.1.1		Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.1.2		Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.3	Bela Negara
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3		Kewaspadaan Nasional
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial

- 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Masyarakat
 - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
 - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
 - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
 - 200.1.4.4 Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.5 Masalah Sosial Masyarakat
 - 200.1.4.6 Fasilitasi
 - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
 - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
 - 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
 - 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
 - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
 - 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
 - 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
 - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.5 Partai Politik yang tidak Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
 - 200.1.5.7 Database Parpol
 - 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
 - 200.1.5.9 Pemilihan Umum
- 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
 - 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
 - 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
 - 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
 - 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 300.1.1 Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

- 300.2.1 Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
 - 300.2.2.1 Rencana dan Standardisasi dan Pengawasan dan Perbekalan
 - 300.2.2.2 Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan Monitoring
 - 300.2.2.3 Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.2.4 Permasalahan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.2.5 Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan
 - 300.2.2.6 Registrasi BEACON
- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan

- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan
 - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
 - 300.2.5.2 Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.3 Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.4 Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
 - 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
 - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
 - 300.2.8.3 Registrasi BEACON
- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
 - 300.2.12.1 Laporan Harian
 - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
 - 300.2.12.3 Laporoan Tahunan
 - 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 400.2.1 Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
 - 400.2.2.1 Data Gender
 - 400.2.2.2 Advokasi dan Fasilitasi
- 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
 - 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
 - 400.2.3.2 Data Perlindungan Perempuan
 - 400.2.3.3 Advokasi dan Fasilitasi
 - 400.2.3.4 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan
 - 400.2.3.5 Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender
 - 400.2.3.6 Analisis dan Penyajian Informasi Gender
 - 400.2.3.7 Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu
- 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)
 - 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
 - 400.2.4.2 Data Perlindungan Anak
 - 400.2.4.3 Advokasi dan Fasilitasi
 - 400.2.4.4 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak
 - 400.2.4.5 Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak
- 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
 - 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
 - 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
 - 400.2.5.3 Data Tumbuh Kembang Anak
 - 400.2.5.4 Advokasi dan Fasilitasi
 - 400.2.5.5 Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
 - 400.2.5.6 Penyelenggaraan *Parenting* Pola Pengasuhan Anak
- 400.2.6 Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
- 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak

400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal

400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)

400.3.2.2 Pelatihan Sosial

400.3.2.3 Peringatan Hari anak

400.3.2.4 Block Grant

400.3.3 Pendidikan Masyarakat

400.3.3.1 Penyelenggaraan Program

400.3.3.2 Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial

400.3.3.3 Pembinaan Program

400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan

400.3.3.5 Pameran

400.3.3.6 Rakor

400.3.3.7 Sosialisasi

400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi

400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

400.3.5.1 Kurikulum, Bahan Ajar

400.3.5.2 Block Grant

400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi,

400.3.5.4 Lomba, Penghargaan, Penganugerahan

400.3.5.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin

400.3.6 Pendidikan Khusus/Layanan Khusus

400.3.6.1 Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran

400.3.6.2 Block Grant

400.3.6.3 Lomba, Festival

400.3.6.4 Sosialisasi, Bimtek

400.3.6.5 Pendataan

400.3.6.6 Kelembagaan

400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan

400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru

400.3.7.3 Sertifikasi Guru

400.3.7.4 Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan

400.3.7.5 Peningkatan Kesejahteraan Guru

400.3.7.6 Sosialisasi, Bimtek

400.3.7.7 Block Grant

400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus

400.3.9.1 Bahan Ajar

400.3.9.2 Petunjuk Teknis

400.3.9.3 *Block Grant*

400.3.9.4 Sosialisasi, Bimtek

400.3.9.5 Lomba, Sayembara, Jambore, Festival

400.3.9.6 Kurikulum/Bahan Pembelajaran

400.3.9.7 Alat Bantu Pembelajaran

400.3.9.8 Pendataan

400.3.9.9 Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)

400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik

- 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
- 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
- 400.3.10.3 Setifikasi Guru
- 400.3.10.4 Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
- 400.3.10.5 Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- 400.3.10.6 Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
- 400.3.10.7 *Block Grant*
- 400.3.10.8 Bimbingan Teknis/Sosialisasi
- 400.3.11 Penilaian Pendidikan
 - 400.3.11.1 Penilaian Akademik
 - 400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
 - 400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
- 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
 - 400.3.12.1 Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
- 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
 - 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

- 400.4.1 Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
 - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
 - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
 - 400.4.3.1 Olahraga Massal
 - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
 - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
- 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
 - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
 - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
 - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
 - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
 - 400.4.5.2 Layanan Khusus
- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
 - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
 - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
 - 400.4.7.2 Kompetisi
 - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
 - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
 - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
 - 400.4.9.1 Industri Olahraga
 - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi

- 400.4.10.1 Daerah
- 400.4.10.2 Nasional
- 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
 - 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
 - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
 - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga
- 400.5 KEPEMUDAAN**
 - 400.5.1 Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
 - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
 - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan)
 - 400.5.2.3 Pengembangan
 - 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
 - 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
 - 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
 - 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
 - 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
 - 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
 - 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
 - 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
 - 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)
 - 400.5.5.1 Pengkajian
 - 400.5.5.2 Pengembangan
 - 400.5.5.3 Pendayagunaan (Fasilitasi)
 - 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
 - 400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
 - 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan
 - 400.5.7 Kewirausahaan
 - 400.5.7.1 Kelembagaan
 - 400.5.7.2 Pengaderan
 - 400.5.7.3 Perintisan
 - 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
 - 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
 - 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
 - 400.5.9.1 Standardisasi
 - 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
 - 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
 - 400.5.10.1 Kemitraan
 - 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda
- 400.6 KEBUDAYAAN**
 - 400.6.1 Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
 - 400.6.2.2 Pelindungan
 - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
 - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
 - 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman

- 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
- 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
- 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film
- 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
- 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
 - 400.6.4.1 Sejarah
 - 400.6.4.2 Pemetaan Nilai
 - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
 - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4.5 Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah
 - 400.6.4.6 Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah
- 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
 - 400.6.5.1 Internalisasi Nilai Budaya
 - 400.6.5.2 Kekayaan Budaya
 - 400.6.5.3 Warisan Budaya Nasional dan Dunia
 - 400.6.5.4 Diplomasi Budaya
- 400.7 KESEHATAN**
 - 400.7.1 Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
 - 400.7.2.1 Pelayanan Kedokteran Keluarga
 - 400.7.2.2 Praktek Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer
 - 400.7.2.3 Pelaksanaan Kesehatan Primer
 - 400.7.2.4 Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas
 - 400.7.2.5 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit
 - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
 - 400.7.2.7 Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
 - 400.7.2.8 Penyakit Mulut di Tingkat Primer
 - 400.7.2.9 Pembiayaan Darah
 - 400.7.2.10 Penggunaan Darah Rasional
 - 400.7.2.11 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah
 - 400.7.2.12 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Kepulauan
 - 400.7.2.13 Akreditasi Puskesmas
 - 400.7.2.14 Puskesmas Berprestasi
 - 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
 - 400.7.3.1 Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 400.7.3.2 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)
 - 400.7.3.3 Pelayanan Rumah Sakit Privat
 - 400.7.3.4 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 400.7.3.5 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan
 - 400.7.3.6 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
 - 400.7.3.7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa
 - 400.7.3.8 Badan Pengawas Rumah Sakit
 - 400.7.3.9 Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
 - 400.7.3.10 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 400.7.4 Keperawatan dan Keteknisian Medik
 - 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
 - 400.7.4.2 Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit
 - 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
 - 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

- 400.7.4.5 Bina Pelayanan Kebidanan
- 400.7.5 Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
 - 400.7.5.1 Mikrobiologi dan Imunologi
 - 400.7.5.2 Patologi dan Toksikologi
 - 400.7.5.3 Radiologi
 - 400.7.5.4 Perizinan dan Sertifikasi
 - 400.7.5.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 400.7.5.6 Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 400.7.5.7 Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
- 400.7.6 Kesehatan Jiwa
 - 400.7.6.1 Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 400.7.6.2 Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 400.7.6.3 Etikolegal dan Asesmen
 - 400.7.6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya
 - 400.7.6.5 Etikolegal dan Asesmen
 - 400.7.6.6 Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko
- 400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
 - 400.7.7.1 Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
 - 400.7.7.2 Imunisasi
 - 400.7.7.3 Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan
 - 400.7.7.4 Kesehatan Matra
- 400.7.8 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 400.7.8.1 Pengendalian Tuberkulosis
 - 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual
 - 400.7.8.3 Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
 - 400.7.8.4 Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
 - 400.7.8.5 Pengendalian Kusta dan Frambusia
- 400.7.9 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 - 400.7.9.1 Pengendalian Malaria
 - 400.7.9.2 Pengendalian Arbovirosis
 - 400.7.9.3 Pengendalian Zoonosis
 - 400.7.9.4 Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
- 400.7.10 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 400.7.10.1 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
 - 400.7.10.2 Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
 - 400.7.10.3 Penyakit Kanker
 - 400.7.10.4 Penyakit Kronis dan Generatif
 - 400.7.10.5 Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
- 400.7.11 Penyehatan lingkungan
 - 400.7.11.1 Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
 - 400.7.11.2 Pemukiman dan Tempat Umum
 - 400.7.11.3 Kawasan dan Sanitasi Darurat
 - 400.7.11.4 Higien Sanitasi Pangan
 - 400.7.11.5 Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi
- 400.7.12 Pengembangan Teknologi Laboratorium dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan
- 400.7.13 Gizi
 - 400.7.13.1 Gizi Makro
 - 400.7.13.2 Gizi Mikro
 - 400.7.13.3 Gizi Klinik dan Dietetik
 - 400.7.13.4 Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
 - 400.7.13.5 Kewaspadaan Gizi

- 400.7.14 Kesehatan Ibu
 - 400.7.14.1 Kesehatan Ibu Hamil
 - 400.7.14.2 Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
 - 400.7.14.3 Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
 - 400.7.14.4 Keluarga Berencana
 - 400.7.14.5 Perlindungan Kesehatan Reproduksi
- 400.7.15 Kesehatan Anak
 - 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
 - 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
 - 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
 - 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
 - 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
- 400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
 - 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
 - 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
 - 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
 - 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
- 400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
 - 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
 - 400.7.17.2 Kapasitas kerja
 - 400.7.17.3 Lingkungan kerja
 - 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
 - 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
 - 400.7.17.6 Kesehatan olahraga
- 400.7.18 Obat Publik dan perbekalan kesehatan
 - 400.7.18.1 Harga obat publik
 - 400.7.18.2 Pengadaan obat
 - 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
- 400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
 - 400.7.19.1 Alat kesehatan
 - 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
 - 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- 400.7.20 Kefarmasian
 - 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian
 - 400.7.20.2 Farmasi klinis
 - 400.7.20.3 Farmasi Komunitas
 - 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional
- 400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
 - 400.7.21.1 Obat tradisional
 - 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
 - 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
 - 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat
- 400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
 - 400.7.22.1 Surat keterangan
 - 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan
- 400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
 - 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
 - 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
 - 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
 - 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
 - 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana

- 400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
 - 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun
 - 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
- 400.7.25 Intelegensia Kesehatan
 - 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
 - 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
- 400.7.26 Kesehatan Haji
 - 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
 - 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
- 400.7.27 Promosi Kesehatan
 - 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
 - 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
 - 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
 - 400.7.27.4 Hari kesehatan
- 400.7.28 Data dan Informasi
 - 400.7.28.1 Statistik kesehatan
 - 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
 - 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
- 400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
 - 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
 - 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
 - 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
 - 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
- 400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
 - 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
 - 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
 - 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
 - 400.7.30.4 Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
 - 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
- 400.7.31 Rekam Medis
- 400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN**
 - 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.8.2 Fasilitasi
 - 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
 - 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
 - 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
 - 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
 - 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
 - 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
 - 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
 - 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
 - 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
 - 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
 - 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
- 400.9 SOSIAL**
 - 400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
 - 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
 - 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
 - 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
 - 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan

- 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- 400.9.3 Rehabilitasi Sosial
 - 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
 - 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi sosial
 - 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
- 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
 - 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
 - 400.9.4.2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan
 - 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
 - 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
- 400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
 - 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
 - 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
 - 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
- 400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- 400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- 400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
 - 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
 - 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
 - 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
- 400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
 - 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
 - 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
 - 400.9.10.4 Kerjasama
- 400.9.11 Jaminan Sosial
 - 400.9.11.1 Seleksi dan verifikasi
 - 400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
 - 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
 - 400.9.11.4 Kerjasama
- 400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
 - 400.9.12.1 Ketahanan keluarga
 - 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
 - 400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
 - 400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
 - 400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
- 400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
 - 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
 - 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
 - 400.9.13.3 Penggalan dan pengembangan potensi
 - 400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
 - 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
- 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
 - 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
 - 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
 - 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
 - 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
 - 400.9.14.5 Bantuan Langsung

- 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
- 400.9.15 Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
 - 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
 - 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
 - 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Desa
- 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
 - 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
- 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
 - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
- 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
- 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
 - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
 - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
 - 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
- 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
 - 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
 - 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
 - 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
 - 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
 - 400.10.6.5 Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
- 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

- 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.11.2 Pertamanan
 - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
 - 400.11.2.2 Taman Kota
 - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
- 400.11.3 Pemakaman
 - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
 - 400.11.3.2 Pemakaman
 - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
- 400.11.4 Jalur Hijau

- 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
- 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
- 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
 - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
 - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
 - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

- 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

- 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
 - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
 - 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
 - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan

- 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.2 Penguatan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk media komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
 - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
 - 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 - 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

- 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
- 400.13.51 Analisis dan evaluasi
 - 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 - 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
 - 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
 - 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 - 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
 - 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

- 400.14.1 Keprotokolan
 - 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
 - 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
 - 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
 - 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
- 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
- 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
- 400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
 - 400.14.4.1 Kliping koran
 - 400.14.4.2 Brosur/Leaflet/poster/plakat
 - 400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan
- 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
 - 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
 - 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
 - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
 - 400.14.5.5 Forum Kehumasan
 - 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
- 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
- 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
- 400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
- 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 400.14.10 Pameran/sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
- 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan

- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
 - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
 - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
 - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
 - 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
 - 500.2.2.14 Informasi Pasar
 - 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
 - 500.2.2.16 Barang Strategis
 - 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
- 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
 - 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
 - 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
 - 500.2.3.4 Tata usaha
 - 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
 - 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
 - 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
 - 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
 - 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
 - 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
 - 500.2.3.11 Jasa
 - 500.2.3.12 Kerjasama
 - 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
 - 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
 - 500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
 - 500.2.3.16 Pengawasan

- 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
- 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP
- 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 500.2.4.1 Pengkajian pasar
 - 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
 - 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
 - 500.2.4.4 Pengkajian pasar
 - 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
 - 500.2.4.6 Sistem informasi
 - 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
 - 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
 - 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang
- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi
- 500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
- 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
 - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
- 500.3.3 Produksi
 - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
 - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
 - 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
 - 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
- 500.3.4 Pembiayaan
 - 500.3.4.1 Program Pendanaan
 - 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - 500.3.4.3 Urusan Permodalan
 - 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
 - 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
 - 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
- 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
 - 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
 - 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
 - 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
 - 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
 - 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
- 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
 - 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
 - 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.5 Advokasi
- 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
 - 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
 - 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
 - 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)

- 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
- 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis
- 500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
 - 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
 - 500.3.8.2 Penelitian UKM
 - 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
 - 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
- 500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
- 500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
 - 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
- 500.3.11 Monitoring dan Evaluasi
- 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- 500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.5.2 Perikanan Tangkap
 - 500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
 - 500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
 - 500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
 - 500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
 - 500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
 - 500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.12 Kelembgaan Usaha Penangkapan
 - 500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
 - 500.5.2.14 Kenelayanan
 - 500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
 - 500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
- 500.5.3 Perikanan Budidaya
 - 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
 - 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
 - 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
 - 500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
 - 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenuhan
 - 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
 - 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
 - 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
 - 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
 - 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
 - 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
 - 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
 - 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
 - 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
 - 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
 - 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya
- 500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
 - 500.5.4.2 Pengembangan Produk

- 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 500.5.4.4 Industri Pengolahan
- 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
- 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
- 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
- 500.5.4.8 Pengembangan Industri
- 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
- 500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
- 500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
- 500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
- 500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
- 500.5.4.18 Pengembangan Impor
- 500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
- 500.5.4.20 Pelayanan Usaha
- 500.5.4.21 Kemitraan Usaha
- 500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
- 500.5.4.23 Investasi dan Permodalan
- 500.5.4.24 Informasi dan Promosi
- 500.5.6 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - 500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
 - 500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
 - 500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
 - 500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya
 - 500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
 - 500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan
 - 500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
 - 500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
 - 500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat
 - 500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur
 - 500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas
 - 500.5.6.12 Pengawakan Kapal Pengawas
 - 500.5.6.13 Sistem Pemantauan
 - 500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
 - 500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan
 - 500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
 - 500.5.6.17 Penyidikan
 - 500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
 - 500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
 - 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
- 500.5.7 Karantina Ikan
 - 500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
 - 500.5.7.2 Penahanan
 - 500.5.7.3 Pengasingan
 - 500.5.7.4 Pengamatan
 - 500.5.7.5 Pengakuan
 - 500.5.7.6 Penolakan
 - 500.5.7.7 Pemusnahan

- 500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
- 500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
- 500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
- 500.5.7.11 Pemasukan Formulir
- 500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
- 500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
- 500.5.7.14 Surat Perintah
- 500.5.7.15 Rekomendasi
- 500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
- 500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
- 500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
- 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
- 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
- 500.5.7.21 Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN

- 500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.6.2 Perlindungan hortikultura
 - 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
 - 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
 - 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
 - 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
- 500.6.3 Perbenihan Hortikultura
 - 500.6.3.1 Penilaian Varietas
 - 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
 - 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
- 500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 - 500.6.4.1 Basis Data Lahan
 - 500.6.4.2 Pengendalian Lahan
 - 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
 - 500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
 - 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
- 500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
 - 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
 - 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
 - 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
 - 500.6.5.4 Kelembagaan
- 500.6.6 Pembiayaan Pertanian
 - 500.6.6.1 Pembiayaan Program
 - 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
 - 500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis
 - 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
- 500.6.7 Pupuk Pesticida
 - 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
 - 500.6.7.2 Pupuk Anorganik
 - 500.6.7.3 Pesticida
 - 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pesticida
- 500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
- 500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan

	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10		Budidaya Serealia
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12		Tanaman Pangan
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13		Pascapanen Tanaman Pangan
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14		Pengolahan Hasil Pertanian
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Hortikultura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15		Mutu dan Standarisasi
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16		Pengembangan Usaha dan Investasi
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17		Pemasaran Domestik
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)
500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20		Diseminasi
500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian

- 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
 - 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
 - 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
 - 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
 - 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
 - 500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
 - 500.6.26 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
 - 500.6.26.1 Hak Cipta
 - 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
 - 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
 - 500.6.26.4 Hak Merek
 - 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
 - 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
 - 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
 - 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
 - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
 - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
 - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
 - 500.6.28 Pelayanan Hukum
 - 500.6.28.1 Sertifikasi
 - 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
 - 500.6.29 Karantina Pertanian
 - 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
 - 500.6.29.2 Karantina Hewan
 - 500.6.30 Bimbingan Teknis
 - 500.6.31 Evaluasi
- 500.7 PETERNAKAN**
- 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 500.7.2.1 Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
 - 500.7.2.2 Pakan Ternak
 - 500.7.2.3 Budidaya Ternak
 - 500.7.2.4 Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)
 - 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
 - 500.7.3 Bimbingan Teknis
 - 500.7.4 Evaluasi
- 500.8 PERKEBUNAN**
- 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.8.2 Tanaman Semusim
 - 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
 - 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
 - 500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
 - 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
 - 500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar

- 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
- 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
- 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
- 500.8.4 Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
- 500.8.5 Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
 - 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
 - 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
- 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
 - 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
 - 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
 - 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
 - 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
- 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
- 500.8.8 Evaluasi Perkebunan
- 500.9 PERINDUSTRIAN**
 - 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
 - 500.9.2.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.2.2 Industri Agro
 - 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.3 Promosi Industri
 - 500.9.3.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.3.2 Promosi Industri Agro
 - 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
 - 500.9.4.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.4.2 Industri Agro
 - 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.5 Hak atas Kekayaan Intelektual
 - 500.9.5.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.5.2 Industri Agro
 - 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.6 Industri Hijau
 - 500.9.6.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.6.2 Industri Agro
 - 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
 - 500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
 - 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri

- 500.9.10 Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
- 500.9.12 Standarisasi
 - 500.9.12.1 Standar
 - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
 - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
- 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
 - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
 - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
- 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.1 Industri Hijau
 - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.3 Energi
- 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
 - 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
 - 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
 - 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
- 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
- 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
 - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
 - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.2.3 Pertambangan
 - 500.10.2.4 Panas Bumi
 - 500.10.2.5 Geosains
 - 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
 - 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
- 500.10.3 Penelitian Kegeologian
 - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
 - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
 - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
 - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
 - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
 - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.3.9 Survei Geologi
- 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
 - 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.4.4 Survei Geologi
 - 500.10.4.5 Konservasi
- 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
 - 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
 - 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
 - 500.10.5.4 Survei Geologi

- 500.10.13 Bioenergi
 - 500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
 - 500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
 - 500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
 - 500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
 - 500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BBN
 - 500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi
 - 500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
 - 500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
 - 500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
- 500.10.14 Aneka Energi
 - 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
 - 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
 - 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
 - 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.15 Konservasi Energi
 - 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
 - 500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
 - 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
 - 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
 - 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
 - 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
 - 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
 - 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
 - 500.10.15.9 Investment Grade Audit (IGA)
 - 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
- 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
 - 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
 - 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
 - 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja
- 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
 - 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)
 - 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)
 - 500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan
- 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
 - 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)
 - 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik
 - 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik
 - 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero))
- 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
 - 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

- 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
- 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB))
- 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM))
- 500.10.20 Sertifikasi
 - 500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
 - 500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
 - 500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
 - 500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
 - 500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi
- 500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan
- 500.10.22 Standarisasi Kompetensi
- 500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
 - 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
 - 500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
 - 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
 - 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
- 500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
 - 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
 - 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
 - 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
 - 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
 - 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan
- 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
 - 500.10.26.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
 - 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
 - 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
 - 500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)
 - 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
 - 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
 - 500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
 - 500.10.26.12 Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
 - 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
 - 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
- 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
 - 500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi

- 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
- 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.6 Pembinaan penelitian/ Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
- 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
- 500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
- 500.10.31 Sarana Litbang
 - 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
 - 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/ Peralatan Uji Kalibrasi
- 500.10.32 Afiliasi
 - 500.10.32.1 Proyek Percontohan
 - 500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
 - 500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.32.4 Penyajian Informasi
- 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
 - 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
 - 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
 - 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
 - 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
- 500.11 PERHUBUNGAN**
 - 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
 - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/ provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
 - 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
 - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
 - 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
 - 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
 - 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
 - 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

- 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
 - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
 - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
 - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
 - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
 - 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
 - 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
 - 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
 - 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
 - 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
 - 500.11.8.7 Angkutan perintis
 - 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
 - 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
 - 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
 - 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
 - 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
 - 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
 - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
 - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
 - 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
- 500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
 - 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.15.2 Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
- 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

- 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
 - 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
 - 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
- 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
 - 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
 - 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
 - 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
 - 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
- 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
 - 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
 - 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian

- 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.28 Pengembangan Keselamatan
 - 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
- 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
 - 500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
 - 500.11.30.1 Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
- 500.11.31 Audit Keselamatan
 - 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
 - 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
 - 500.11.32.1 Pedoman keselamatan
 - 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.33 Parkir
 - 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
 - 500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
 - 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah
- 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
 - 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.12.2 Telekomunikasi
 - 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
 - 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
 - 500.12.3 Penyiaran
 - 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
 - 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
 - 500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
 - 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
 - 500.12.5 Pengendalian Informatika
 - 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
 - 500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban
 - 500.12.6 e- Government
 - 500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
 - 500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
 - 500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government

- 500.12.6.4 Aplikasi Layanan Pemerintahan
- 500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik
- 500.12.7 e- Business
 - 500.12.7.1 Tata Kelola e-Business
 - 500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business
 - 500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business
 - 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Business
- 500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
 - 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
 - 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
- 500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
 - 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
 - 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
 - 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
 - 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
- 500.12.10 Keamanan Informasi
 - 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
 - 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
 - 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
 - 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
 - 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
- 500.12.11 Komunikasi Publik
 - 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
 - 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
 - 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
- 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
 - 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
 - 500.12.12.2 Informasi Perekonomian
 - 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
- 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
 - 500.12.13.1 Media Cetak
 - 500.12.13.2 Media Online
 - 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
 - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
 - 500.12.15.1 Jaringan
 - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
 - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat

500.12.18.3 Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata

500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata

500.13.2.3 Industri Pariwisata

500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event

500.13.3 Pemasaran Pariwisata

500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri

500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri

500.13.3.4 Pencitraan Indonesia

500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman

500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik

500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa

500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK

500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

500.13.5.2 Desain dan Arsitektur

500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitas

500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata

500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

500.14.2.2 Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba

500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan

500.14.2.4 Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)

500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus

500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus

500.14.3 Survei

500.14.3.1 Perencanaan

500.14.3.2 Persiapan

500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)

- 500.14.3.4 Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
- 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
- 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
- 500.14.4 Konsolidasi Data Statistik
 - 500.14.4.1 Kompilasi Data
 - 500.14.4.2 Analisis data
 - 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
- 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
- 500.15 KETENAGAKERJAAN**
- 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
 - 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
 - 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
- 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
 - 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
 - 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
 - 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
 - 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
- 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
 - 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
 - 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
 - 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
 - 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
- 500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
 - 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
 - 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
 - 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
 - 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
- 500.15.6 Bina Pemagangan
 - 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
 - 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
 - 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
 - 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
- 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
 - 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
 - 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
- 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
 - 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
 - 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
 - 500.15.8.3 Bursa Kerja
 - 500.15.8.4 Analisis Jabatan
- 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - 500.15.9.1 Antar Kerja
 - 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
 - 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

- 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
- 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
 - 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
 - 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
 - 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
 - 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
- 500.15.11 Standardisasi Profesi
 - 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
 - 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
- 500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
 - 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
 - 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
 - 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
 - 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
- 500.15.13 Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
 - 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
 - 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
 - 500.15.13.3 Pemasarakatan Hubungan Industrial
- 500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.14.1 Pengupahan
 - 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
- 500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
 - 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
 - 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
 - 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
- 500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
 - 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
 - 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
 - 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
 - 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 - 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
 - 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
 - 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
 - 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K3
 - 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3
 - 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3

- 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
- 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

- 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
- 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
 - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
 - 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
 - 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
 - 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
- 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
 - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
 - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
 - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
- 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
 - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
 - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
- 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
 - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
 - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
 - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
 - 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
- 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

- 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah

- 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
- 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
- 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
- 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
 - 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
 - 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
 - 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
- 500.17.4 Sengketa Tanah
 - 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
 - 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

- 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
 - 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
 - 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
 - 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
 - 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
 - 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
 - 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
- 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
 - 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
 - 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
 - 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
 - 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
- 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
 - 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
 - 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
 - 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
 - 500.18.5.4 Pelayanan Investasi
- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
 - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
 - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
 - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
 - 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
- 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
 - 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
 - 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
 - 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
 - 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
- 500.18.8 Pengembangan Usaha
 - 500.18.8.1 Kewirausahaan
 - 500.18.8.2 Produksi
 - 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
 - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
 - 500.18.9.2 Pengembangan Sarana

- 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
- 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
 - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
 - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
 - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

- 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
- 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
- 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
- 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
 - 600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
- 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
 - 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
 - 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
- 600.1.8 Pembangunan Jalan
 - 600.1.8.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
 - 600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
 - 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
- 600.1.9 Preservasi Jalan
 - 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
 - 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan
- 600.1.10 Pengelolaan Jembatan
 - 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.10.3 Teknik Jembatan

- 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
- 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
 - 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
 - 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
 - 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
- 600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
 - 600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol
 - 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
 - 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
 - 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
- 600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
 - 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
 - 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
- 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
 - 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
 - 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
 - 600.1.14.5 Kelembagaan
- 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
 - 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
 - 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
 - 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
 - 600.1.15.5 Kelembagaan
- 600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
 - 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
 - 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
 - 600.1.16.5 Kelembagaan
 - 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
- 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
 - 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
 - 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
 - 600.1.17.5 Kelembagaan
 - 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
- 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi
- 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**
- 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
 - 600.2.2.3 Kemitraan
- 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
 - 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
 - 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

- 600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
 - 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
 - 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
 - 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
- 600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.5.2 Analisa Teknik
 - 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
 - 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
- 600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
 - 600.2.6.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.6.2 Penyediaan
 - 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
 - 600.2.6.4 Pengelolaan
- 600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
 - 600.2.7.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
 - 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
 - 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
 - 600.2.7.5 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
 - 600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan
- 600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
 - 600.2.8.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum
 - 600.2.8.3 Fasilitas Hunian Berimbang
 - 600.2.8.4 Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan
- 600.2.9 Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.3 Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur
- 600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan
 - 600.2.10.2 Kontrak Konstruksi
 - 600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan
 - 600.2.10.4 Manajemen Mutu
- 600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
 - 600.2.11.1 Kelembagaan
 - 600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi
 - 600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
 - 600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi
- 600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi
 - 600.2.12.2 Penerapan Kompetensi
 - 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
 - 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas
- 600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama

- 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- 600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
 - 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
 - 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
- 600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.2 Pengembangan Materi
 - 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
- 600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
 - 600.2.16.1 Antar Sektor
 - 600.2.16.2 Antar Wilayah
- 600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
 - 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
 - 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
- 600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
 - 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
 - 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
 - 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
 - 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
- 600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi
- 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)**
 - 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
 - 600.3.2 Perencanaan
 - 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
 - 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
 - 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
 - 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
 - 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
 - 600.3.2.7 Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
 - 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
 - 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
 - 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
 - 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
 - 600.3.4 Pemetaan
 - 600.3.4.1 Peta Dasar
 - 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
 - 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
 - 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara
- 600.4 LINGKUNGAN HIDUP**
 - 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
 - 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
 - 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
 - 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
 - 600.4.5 Dampak Lingkungan

- 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
- 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
- 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
 - 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
 - 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
 - 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa
 - 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
 - 600.4.8.1 Pengembangan
 - 600.4.8.2 Pemanfaatan
 - 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
 - 600.4.8.4 Keamanan Hayati
 - 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
- 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
 - 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
 - 600.4.9.2 Rawa
- 600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
 - 600.4.10.1 Perangkat mitigasi
 - 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
 - 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
 - 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
- 600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
 - 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
 - 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
- 600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
 - 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
 - 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
 - 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
 - 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
 - 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
- 600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
 - 600.4.14.1 Pemantauan
 - 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
- 600.4.15 Pengelolaan Sampah
 - 600.4.15.1 Pembatasan sampah
 - 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
 - 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
 - 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
- 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
 - 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
 - 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan

- 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
 - 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
- 600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
 - 600.4.18.1 Penyidikan
 - 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
 - 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
- 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
 - 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
 - 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
- 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
 - 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
 - 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
- 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
 - 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
 - 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
- 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
 - 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
 - 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
- 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
 - 600.4.23.1 Pengelolaan Data
 - 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
 - 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
 - 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
 - 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
 - 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
- 600.4.25 Standarisasi dan teknologi
 - 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
 - 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
 - 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
- 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
 - 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
 - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
 - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
 - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
 - 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
 - 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
 - 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
 - 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
 - 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan

	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800 KEPEGAWAIAN		
800.1 SUMBER DAYA MANUSIA		
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
	800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
	800.1.3	Mutasi Pegawai
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
	800.1.4	Pengembangan Karir
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/ agang/Ujian Dinas/ raktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara

	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya)
800.1.7		Bantuan Hukum
800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10		Pengawasan dan pengendalian
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honororer
800.1.11		Administrasi Pegawai
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13		Administrasi Perseorangan
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

- 800.1.14 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi
- 800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
 - 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
 - 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
 - 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
 - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
 - 800.2.2.4 Modul-modul diklat
 - 800.2.2.5 Panduan fasilitator
 - 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
 - 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
 - 800.2.3 Widyaiswara
 - 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
 - 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
 - 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
 - 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
 - 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
 - 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
 - 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
 - 800.2.4.5 Sistem informasi diklat
 - 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
 - 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
 - 800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

- 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
 - 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
 - 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
 - 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
 - 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
- 900.1.2 Penyusunan Anggaran
 - 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
 - 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
 - 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
 - 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
 - 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
 - 900.1.3.2 Pendapatan
 - 900.1.3.3 Belanja
 - 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah

	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
900.1.6		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
900.1.7		Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

- 900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/ Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)
- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
- 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
- 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
- 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
- 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
- 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
- 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
- 900.1.12.1 Anggaran Daerah
- 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
- 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
- 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
- 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
- 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)
- 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
- 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan
- 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)
- 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)

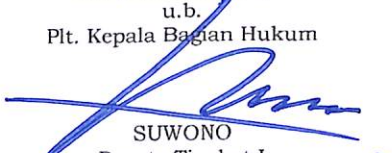
900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 39 TAHUN 2023
 TANGGAL : 8 - 9 - 2023

**JADWAL RETENSI ARSIP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN KEDIRI**

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
I	UMUM			
	A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN			
	1. Telekomunikasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4. Penggunaan Fasilitas Kantor	1 tahun	1 tahun	Musnah
	5. Rapat Pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)	1 tahun	1 tahun	Musnah
	6. Penyediaan Konsumsi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	7. Pengurusan Kendaraan Dinas			
	a. Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Pemeliharaan dan Perbaikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	8. Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor			
	a. Pertamanan/ <i>Landscape</i>	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Penghijauan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	c. Perbaikan Gedung	1 tahun	1 tahun	Musnah
	d. Perbaikan Peralatan Kantor	1 tahun	1 tahun	Musnah
	e. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	1 tahun	1 tahun	Musnah
	f. Kebersihan Gedung dan Taman	1 tahun	1 tahun	Musnah
	9. Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer			
	a. Perbaikan/Pemeliharaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Pemasangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	10. Ketertiban dan Keamanan			
	a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Laporan Ketertiban dan Keamanan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	11. Administrasi Pengelolaan Parkir	1 tahun	1 tahun	Musnah
	12. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	1 tahun	1 tahun	Musnah
	B. PERLENGKAPAN			
	1. Inventarisasi dan Penyimpanan			

a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	2 tahun setelah pematkhiran data	3 tahun	Musnah
b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
2. Pemeliharaan Peralatan Kantor			Musnah
a. Data Hasil Pemeliharaan Kantor	2 tahun setelah pematkhiran data	3 tahun	Musnah
b. Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	2 tahun	3 tahun	Musnah
3. Distribusi			Musnah
a. Barang Habis Pakai	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Barang Milik Daerah	2 tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan	3 tahun	Musnah
4. Penghapusan Barang Milik Daerah - Keputusan Pembentukan Tim - Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah - Daftar Barang yang dihapuskan - Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk didalamnya Proses Lelang Penghapusan	3 tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
5. Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
C. PENGADAAN			
1. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa - Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa - Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan - Penetapan kebijakan umum - Penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2. Pengadaan Langsung - Persiapan pemilihan penyedia - Pelaksanaan pemilihan penyedia - Penandatanganan kontrak - Pelaksanaan kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3. Pengadaan Tidak Langsung/Lelang - Persiapan pemilihan penyedia - Pelaksanaan pemilihan penyedia - Penandatanganan kontrak - Pelaksanaan kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4. Swakelola - Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5. Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan - Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa - Data Base kontrak - Data Base Pengadaan Barang/jasa	2 tahun setelah pematkhiran data	3 tahun	Permanen

6. Monitoring dan Evaluasi - Laporan Hasil Monitoring - Laporan hasil evaluasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
D. PERPUSTAKAAN			
1. Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Deposit Bahan Pustaka			
a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Terbitan Internasional dan Regional	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Bibliografi dan Katalog	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Koleksi Pustaka			
a. Pembelian	3 tahun	7 tahun	Musnah
b. Hibah	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Hadiah	1 tahun	1 tahun	Musnah
d. Tukar Menukar	1 tahun	1 tahun	Musnah
e. Implementasi Undang-Undang KCKR	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Terbitan Internal	1 tahun	1 tahun	Musnah
g. Pendistribusian bahan pustaka surplus	1 tahun	1 tahun	Permanen
h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Pengolahan Bahan Pustaka	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
6. Layanan Perpustakaan			
a. Keanggotaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
b. Peminjaman	1 tahun	1 tahun	Musnah
c. Pengembangan gemar baca	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
7. Kerjasama Perpustakaan			
a. MoU	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah	3 tahun	Permanen
b. Perjanjian Kerjasama	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
c. Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
8. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			

a. Pengembangan Situs Web	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
b. Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
c. Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
d. Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
9. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
10. Konservasi			
a. Perawatan Bahan Perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Perbaikan Bahan Perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
11. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 tahun	3 tahun	Musnah
12. Transformasi Digital	2 tahun	3 tahun	Musnah
13. Kurasi Digital	2 tahun	3 tahun	Permanen
14. Pengembangan Perpustakaan			
a. Perpustakaan Umum	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Perpustakaan Khusus	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Perpustakaan Sekolah	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Perpustakaan Perguruan Tinggi	2 tahun	3 tahun	Musnah
E. KEARSIPAN			
1. Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pembinaan Kearsipan			
a. Pengembangan Profesi Arsiparis - Formasi Jabatan Arsiparis - Analisis Kebutuhan Arsiparis	1 tahun	1 tahun	Permanen
b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 tahun	1 tahun	Musnah
c. Penilaian Arsiparis	1 tahun	1 tahun	Musnah
d. Pemilihan Arsiparis Teladan - Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan - Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Data Base Arsiparis	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
f. Bimbingan Konsultasi Kearsipan	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Supervisi dan Evaluasi - Perencanaan Supervisi dan Evaluasi - Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi - Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah

h.	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
i.	Fasilitasi Kearsipan - Fasilitasi SDM Kearsipan - Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	3 tahun	7 tahun	Musnah
j.	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan - Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan - Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	2 tahun	3 tahun	Musnah
k.	Jadwal Retensi Arsip - Berkas Usulan Persetujuan JRA - Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
3.	Pengelolaan Arsip Dinamis			
a.	Penciptaan - Registrasi Naskah Masuk dan Keluar - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b.	Pemberkasan Arsip Aktif - Daftar Berkas - Daftar Isi Berkas	2 tahun	3 tahun	Musnah
c.	Penataan Arsip Inaktif - Daftar Arsip Inaktif - Daftar Arsip Inaktif Tematik	2 tahun	3 tahun	Musnah
d.	Penggunaan - Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis - Bukti Pemimjaman Arsip	1 tahun	1 tahun	Musnah
e.	Autentikasi Arsip Dinamis - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis	1 tahun	1 tahun	Permanen
4.	Program Arsip Vital - Identifikasi Arsip Vital - Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital - Penyelamatan Arsip Vital - Pemulihan Arsip Vital	2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai	3 tahun	Permanen
5.	Pengelolaan Arsip Terjaga - Daftar Identifikasi Arsip Terjaga - Daftar Berkas Arsip Terjaga - Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga - Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga - Surat Penyerahan Arsip Terjaga - Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga - Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai	3 tahun	Permanen
6.	Penyusutan Arsip			

	a. Pemindahan Arsip - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b. Pemusnahan Arsip - SK Penetapan Panitia Penilai Arsip - Pertimbangan Panitia Penilai - Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun - Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip - Daftar arsip Yang Dimusnahkan	1 tahun	1 tahun	Permanen
	c. Penyerahan Arsip Statis - Pembentukan panitia penilai - Notulen rapat panitia - Surat pertimbangan panitia penilai - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip - Keputusan Penetapan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar Arsip yang diserahkan	1 tahun	1 tahun	Permanen
	7. Alih Media Arsip - Kebijakan alih media - Autentikasi, Berita Acara - Daftar Arsip yang alih mediakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	8. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis			
	a. Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 tahun setelah data di perbarui (update)	1 tahun	Permanen
	b. Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1 tahun setelah data di perbarui (update)	1 tahun	Permanen
	9. Pengelolaan Arsip Statis			
	a. Akuisisi - Monitoring fisik dan daftar, - Verifikasi terhadap daftar arsip - Menetapkan status arsip statis - Persetujuan untuk Penyerahan - Penetapan arsip yang diserahkan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar arsip yang diserahkan	1 tahun	1 tahun	Permanen
	b. Penghargaan dan Imbalan	1 tahun	1 tahun	Permanen
	c. Sejarah Lisan - Administrasi kegiatan - Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI dan Transkip)	1 tahun	1 tahun	Permanen

d. Daftar Pencarian Arsip Statis - Pengumuman - Akuisisi daftar pencarian arsip statis	1 tahun	1 tahun	Permanen
e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik - Daftar arsip statis - Inventaris arsip statis - Guide	1 tahun	1 tahun	Permanen
f. Preservasi Preventif - Penyimpanan - Pengendalian hama terpadu - Reproduksi (alih media)	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Preservasi Kuratif	1 tahun	1 tahun	Permanen
h. Autentikasi Arsip Statis - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Statis	2 tahun	3 tahun	Permanen
i. Akses Arsip Statis - Layanan arsip - Penerbitan naskah sumber	2 tahun	3 tahun	Musnah
10. Jasa Kearsipan - Konsultasi kearsipan - Manual kearsipan - Penataan arsip otomatis kearsipan - Penyimpanan arsip - Perawatan - Pemeliharaan arsip	2 tahun	3 tahun	Musnah
11. Pengelolaan SIKN dan JIKN	2 tahun	3 tahun	Musnah
12. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	2 tahun	3 tahun	Musnah
13. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	2 tahun	3 tahun	Permanen
14. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	2 tahun	3 tahun	Musnah
15. Pengawasan Kearsipan			
a. Pengawasan Kearsipan Internal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengawasan Kearsipan Eksternal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Sanksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
F. PERSANDIAN			
1. Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pengamanan persandian			
a. Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
b. Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
c. Materiil sandi: sistem dan peralatan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
3. Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
a. Perencanaan Pengkajian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
b. Administrasi Pengkajian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
c. Pelaksanaan	2 Tahun	3 tahun	Permanen

d. Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
4. Pembinaan dan Pengendalian Persandian			
a. Sumber Daya Manusia (SDM)	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Jaring Komunikasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
5. Layanan Sertifikasi Elektronik			
a. Perencanaan dan Administrasi	1 Tahun	1 tahun	Musnah
b. Pelaksanaan Verifikasi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	2 Tahun	3 tahun	Permanen
d. Penyesuaian Sistem dan Testing	1 Tahun	1 tahun	Musnah
f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1 Tahun	1 tahun	Permanen
g. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2 Tahun	3 tahun	Permanen
h. Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang			
a. Musrenbang Provinsi	3 tahun	7 Tahun	Permanen
b. Musrenbang Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
c. Musrenbang Kab/Kota	3 tahun	7 Tahun	Permanen
d. Musrenbang Kecamatan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
e. Musrenbang Kelurahan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
f. Musrenbang Desa	3 tahun	7 Tahun	Musnah
2. Perencanaan Pembangunan Daerah			
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Rencana Anggaran Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Rencana Pembangunan Tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e. Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
f. Program kerja tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
g. Penetapan/Kontrak Kinerja	2 tahun	3 Tahun	Musnah
h. Laporan Berkala	1 tahun	1 Tahun	Musnah
i. Laporan Insidental	1 tahun	1 Tahun	Permanen
j. Evaluasi Program	1 tahun	1 Tahun	Permanen
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
4. Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
5. Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1 tahun	1 Tahun	Permanen
6. Aksi Strategis Daerah			
a. Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
c. Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
d. Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
e. Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
7. Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
a. Pendanaan Nasional dan Hibah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
b. Pendanaan Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
c. Kerjasama Pembangunan Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
d. Surat Berharga Syariah Negara	3 tahun	7 Tahun	Permanen
e. Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	3 tahun	7 Tahun	Permanen

	H. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
	1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
	a. Pembentukan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Perubahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pembubaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja			
	a. Analisa Jabatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Analisa Beban Kerja	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Ketatalaksanaan			
	a. Proses Bisnis	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Standar Pelayanan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Standar Operasional Prosedur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pelayanan Publik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5. Evaluasi Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6. Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi			
	a. Budaya Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	I. PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN			
	1. Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan - Rencana Kerja - Administrasi Penelitian - Pelaksanaan - Hasil Penelitian - Hasil Pengkajian dan Pengembangan - Rekomendasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4. Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
	a. Data	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Statistik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7. Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	8. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	9. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	10. Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	2 tahun	3 tahun	Musnah
II	PEMERINTAHAN			
	A. OTONOMI DAERAH			

1. Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3. Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4. Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			Permanen
a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	2 Tahun	3 Tahun	
b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Assosiasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5. Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			Musnah
a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan Kapasitas Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6. LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
B. PEMERINTAHAN UMUM			
1. Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Dekonsentrasi dan Kerjasama			
a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Fasilitasi Kecamatan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Fasilitasi Pelayanan Umum	2 tahun	3 Tahun	Musnah
3. Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
a. Toponimi dan Data Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
b. Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	5 tahun	5 Tahun	Permanen
c. Batas Antar Daerah Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
d. Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	5 tahun	5 Tahun	Permanen
e. Pemeliharaan Batas Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
C. HUKUM			
1. Program Legislasi			
a. Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Program Legislasi	2 tahun	3 tahun	Permanen

2. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan - Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	2 tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen
3. Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah			
a. Keputusan/Ketetapan Bupati	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Instruksi/Surat Edaran			
a. Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II dan III	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Surat Perintah			
a. Surat Perintah Bupati	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Surat Perintah Setingkat Eselon II	2 tahun	3 tahun	Musnah
6. Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	2 tahun	3 tahun	Permanen
7. Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama			
a. Dalam Negeri	2 tahun setelah kerjasama berakhir dankewajiban para pihak telah dilaksanakan	3 tahun	Permanen
b. Luar Negeri	2 tahun setelah kerjasama berakhir dankewajiban para pihak telah dilaksanakan	3 tahun	Permanen
8. Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Sampai dengan tidak berlaku	1 Tahun	Simpan di perpustakaan
9. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
10. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	2 Tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
11. Kasus/Sengketa Hukum			
a. Pidana Kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
b. Perdata Kasus/sengketa perdata	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
c. Tata Usaha Negara	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
d. Perburuhan	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah

	e. Arbitrase	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
	f. Sengketa Adat	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
	12. Perijinan	2 tahun setelah ijin diperbarui	3 tahun	Permanen
	13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
	a. Hak Cipta	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	b. Hak Paten	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	c. Hak Desain Industri	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	d. Hak Rahasia Dagang	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	e. Hak Merk	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	14. Permohonan HaKI yang ditolak□	1 tahun Setelah ditolak	1 tahun	Musnah
III	POLITIK			
	A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	1. Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
	a. Ketahanan Ideologi Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Wawasan Kebangsaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Bela Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Kewaspadaan Nasional			
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan			
	a. Ketahanan Seni	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Ketahanan Budaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Agama dan Kepercayaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Organisasi Kemasyarakatan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Masalah Sosial Kemasyarakatan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Fasilitasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen

	j. Fasilitasi Sengketa Ormas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Fasilitasi Ormas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Politik Dalam Negeri			
	a. Implementasi Kebijakan Politik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pemerintah Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Database Parpol	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Pendidikan Budaya Politik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Pemilihan Umum	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Ketahanan Ekonomi			
	a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
IV	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
	A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1. Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja			
	a. Tata Operasional Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Perlindungan Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	B. PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN			
	1. Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan			
	a. Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Permasalahatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah (kecuali laporan)
	f. Registrasi BEACON	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4. Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5. Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan			
	a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Musnah

	c. Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6. Operasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7. Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	8. Operasi Komunikasi			
	a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Registrasi BEACON	2 tahun	3 tahun	Musnah
	9. Inventarisasi dan Pemeliharaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	10. Pengembangan Sistem Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	11. Penyajian dan Layanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	12. Pelaporan dan Evaluasi			
	a. Laporan Harian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Laporan Bulanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Laporan Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
V	KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1. Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum			
	a. Data gender	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	b. Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3. Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)			
	a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Data perlindungan perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 tahun	Permanen
	e. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f. Analisis dan penyajian informasi gender	2 tahun	3 tahun	Musnah
	g. Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4. Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)			
	a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
	b. Data perlindungan anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	c. Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e. Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	2 tahun	3 tahun	Musnah

5. Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)			
a. Pemenuhan Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
b. Data Klaster Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
c. Data tumbuh kembang anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
d. Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
f. Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
6. Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	2 tahun	3 tahun	Permanen
7. Penghargaan Kabupaten Layak Anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
8. Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
B. PENDIDIKAN			
1. Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal			
a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pelatihan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Peringatan Hari anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Pendidikan Masyarakat			
a. Penyelenggaraan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Penilaian dan pemberian bantuan sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pembinaan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Lomba/Pemberian Penghargaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pameran	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Rakor	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
h. Sertifikasi dan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama			
a. Kurikulum, bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Lomba, penghargaan, penganugerahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Bantuan operasional sekolah (BOS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
f. Bantuan Siswa Miskin	2 tahun	3 tahun	Permanen
6. Pendidikan khusus/Layanan Khusus			
a. Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Lomba, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah

7. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik			
a. Pendataan dan Pemetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Sertifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Peningkatan kesejahteraan guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
8. Pendidikan Khusus-Layanan Khusus			
a. Bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Petunjuk Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Lomba, sayembara, jambore, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Kurikulum/bahan pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
h. Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
i. Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
9. Pendidik dan Tenaga Pendidik			
a. Pendataan dan Pemetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Sertifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
h. Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
10. Penilaian Pendidikan			
a. Penilaian Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penilaian Non Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2 tahun	3 tahun	Permanen
11. Data dan Statistik Pendidikan			
a. Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
12. Prasarana dan Sarana Pendidikan			
a. Prasarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
b. Sarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
C. KEOLAHRAGAAN			
1. Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	1 tahun	1 tahun	Musnah
b. Olahraga Pendidikan Tinggi	1 tahun	1 tahun	Musnah
c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	1 tahun	1 tahun	Musnah

3.	Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
a.	Olahraga Massal	1 tahun	1 tahun	Musnah
b.	Olahraga Tradisional	1 tahun	1 tahun	Musnah
c.	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	1 tahun	1 tahun	Musnah
4.	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			
a.	Olahraga Pendidikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
b.	Olahraga Rekreasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
c.	Olahraga Prestasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
d.	Sekolah Khusus Olahraga	1 tahun	1 tahun	Musnah
5.	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
a.	Olahraga Tradisional	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Layanan Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
6.	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
a.	Kemitraan Keolahragaan	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
b.	Penghargaan Olahraga	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
7.	Pembibitan dan IPTEK Olahraga			
a.	Pembibitan Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Kompetisi	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	IPTEK Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
8.	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan			
a.	Tenaga Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Organisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
9.	Industri dan Promosi Olahraga			
a.	Industri Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Promosi Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
10.	Olahraga Prestasi			
a.	Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Nasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
11.	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			
a.	Standardisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c.	Infrastruktur Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
D. KEPEMUDAAN				
1.	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda			
a.	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
b.	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 tahun	Permanen

c. Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Peningkatan Wawasan Pemuda			
a. Wawasan Kebangsaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Wawasan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Wawasan Sosial dan Hukum	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Peningkatan Kapasitas Pemuda			
a. Kapasitas Iman dan Taqwa	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Kapasitas IPTEK	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pemanfaatan IPTEK	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)			
a. Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pendayagunaan (fasilitasi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
6. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
a. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	2 tahun	3 tahun	Musnah
7. Kewirausahaan			
a. Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengaderan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Perintisan	2 tahun	3 tahun	Musnah
8. Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			
a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
9. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda			
a. Standardisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Infrastruktur Pemuda	2 tahun	3 tahun	Musnah
10. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda			
a. Kemitraan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Penghargaan Pemuda	2 tahun	3 tahun	Musnah
E. KEBUDAYAAN			
1. Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			
a. Registrasi Nasional	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
b. Pelindungan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
c. Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
d. Eksplorasi dan Dokumentasi	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
3. Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
a. Pembinaan Seni Pertunjukan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

b. Pembinaan Seni Rupa	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
c. Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
d. Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
4. Sejarah dan Nilai Budaya			
a. Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pemetaan nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Verifikasi dan Perumusan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Dokumentasi dan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f. Publikasi sejarah dan nilai sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
a. Internalisasi nilai budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Kekayaan budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Warisan budaya nasional dan dunia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Diplomasi budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
F. KESEHATAN			
1. Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Upaya Kesehatan Dasar			
a. Pelayanan kedokteran keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pelaksanaan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. ICD 10, Destistry & Stomatology	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Infeksi menular lewat transfusi darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Penyakit mulut di tingkat primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i. Pembiayaan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j. Penggunaan darah rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
k. Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
l. Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
m. Akreditasi puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
n. Puskesmas berprestasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3. Upaya Kesehatan Rujukan			
a. Pelayanan kesehatan rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pelayanan rumah sakit privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Pelayanan pasien jaminan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Badan pengawas rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i. Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j. Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4. Keperawatan dan keteknisian medik			
a. Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

b. Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Bina pelayanan kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5. Penunjang medik dan sarana kesehatan			
a. Mikrobiologi dan imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Patologi dan toksilologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Perizinan dan sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Sarana dan prasarana kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6. Kesehatan Jiwa			
a. Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Kesehatan jiwa kelompok beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7. Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra			
a. Surveilans dan respon kejadian luar biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kesehatan matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8. Pengendalian penyakit menular langsung			
a. Pengendalian tuberkulosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pengendalian kusta dan frambusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9. Pengendalian penyakit bersumber binatang			
a. Pengendalian malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengendalian arbovirosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengendalian zoonosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengendalian filariasis dan kecacingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10. Pengendalian penyakit tidak menular			
a. Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penyakit kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penyakit kronis dan generatif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11. Penyehatan lingkungan			
a. Penyehatan air dan sanitasi dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pemukiman dan tempat umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kawasan dan sanitasi darurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Higien sanitasi pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

e. Pengamanan limbah, udara, radiasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12. Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
13. Gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Gizi makro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Gizi mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Gizi klinik dan diatetik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Konsumsi makanan dan jasa makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kewaspadaan gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14. Kesehatan ibu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Kesehatan ibu hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kesehatan ibu bersalin dan nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Perlindungan kesehatan reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15. Kesehatan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Kelangsungan hidup bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kewaspadaan penanganan balita beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Perlindungan kesehatan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Kesehatan tradisional keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kesehatan tradisional ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kesehatan alternatif dan komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penapisan dan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
17. Kesehatan kerja dan Olah raga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Pelayanan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kapasitas kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Lingkungan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kemitraan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kesehatan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Kesehatan olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18. Obat Publik dan perbekalan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Harga obat publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengadaan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Perbekalan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
19. Produksi dan distribusi alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20. Kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a. Pelayanan kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Farmasi klinis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Farmasi Komunitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	d. Penggunaan obat rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21	Produksi dan distribusi kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Obat tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kosmetik dan makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kemandirian obat dan bahan baku obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22.	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Surat keterangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sertifikasi dan perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
23.	Penanggulangan Krisis Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Tanggap darurat dan pemulihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pemantauan dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24.	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Tersedianya data NHA setiap tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
25.	Intelegensia Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
26.	Kesehatan Haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
27.	Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Sarana Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan pesan promosi kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Hari kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
28.	Data dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Statistik kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	b. Analisis dan diseminasi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	c. Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
29.	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	a. Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	b. Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Obat Asli Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
30.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	a. Penilaian keamanan pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Standardisasi produk pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pengawasan produk dan bahan berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
31.	Rekam Medis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
G. AGAMA DAN KEPERCAYAAN				

1. Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Fasilitasi			
a. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Kasus Keagamaan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
e. Kasus Aliran Keagamaan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
3. Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME			
a. Kelembagaan dan kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Komunitas Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
H. SOSIAL			
1. Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Kesejahteraan Sosial Anak			
a. Kesejahteraan sosial anak balita	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Kesejahteraan sosial anak terlantar	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Rehabilitasi Sosial			
a. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kelembagaan dan advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
4. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
a. Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Tuna susila dan korban trafficking perempuan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
5. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	2 tahun	3 Tahun	Musnah
a. Pelayanan sosial lanjut usia			
b. Pelayanan sosial dalam dan luar panti	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
6. Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	3 tahun	7 Tahun	Musnah
7. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	2 tahun	3 Tahun	Permanen
8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial			
a. Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen

9. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam			
a. Kesiapsiagaan dan mitigasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pemulihan sosial dan penguatan sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Kerjasama	2 tahun	3 Tahun	Permanen
10. Jaminan Sosial			
a. Seleksi dan verifikasi	3 tahun	7 Tahun	Musnah
b. Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	3 tahun	7 Tahun	Musnah
c. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	3 tahun	7 Tahun	Musnah
d. Kerjasama	3 tahun	7 Tahun	Musnah
11. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial			
a. Ketahanan keluarga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kemitraan dunia usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	2 tahun	3 Tahun	Musnah
12. Pemberdayaan komunitas adat terpencil			
a. Persiapan pemberdayaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pemberdayaan sumber daya manusia	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Penggalan dan pengembangan potensi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e. Kerjasama kelembagaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
13. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan			
a. Identifikasi dan analisis	3 tahun	7 Tahun	Musnah
b. Pengembangan kapasitas	3 tahun	7 Tahun	Musnah
c. Penataan sosial lingkungan kumuh	3 tahun	7 Tahun	Musnah
d. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	3 tahun	7 Tahun	Musnah
e. Bantuan Langsung	3 tahun	7 Tahun	Musnah
f. Kerjasama Kelembagaan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
14. Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			
a. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan kesetiakawanan sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengelolaan taman makam pahlawan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
I. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
1. Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Desa	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Pengembangan Kapasitas Desa	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
a. Lembaga Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah

b. Pembangunan Partisipatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pendataan Potensi Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengembangan Kawasan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Pelatihan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Pen Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
a. Budaya Nusantara	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pemberdayaan Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Kesejahteraan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Tenaga Kerja Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Usaha Ekonomi Masyarakat			
a. Usaha Pertanian dan Pangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Produksi dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Usaha Ekonomi dan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
6. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan			
a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
7. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	2 tahun	3 tahun	Musnah
J. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN			
1. Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pertamanan			
a. Perencanaan Pertamanan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Taman Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Tata Hias dan Ornamen Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Pemakaman			
a. Perencanaan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pemakaman	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Pelayanan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Jalur Hijau			
a. Perencanaan Jalur Hijau	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Jalur Hijau Jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Peran Serta Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
6. Pengawasan dan Penindakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
7. Pengelolaan Data	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
8. Evaluasi dan Pelaporan	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah
K. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
1. Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

2. Pendaftaran Penduduk			
a. Identitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pendataan Penduduk Rentan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
3. Pencatatan Sipil			
a. Kelahiran dan Kematian	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Perkawinan dan Perceraian	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pencatatan Kewarganegaraan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
5. Pengembangan Kebijakan Kependudukan			
a. Kuantitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Kualitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Mobilitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
6. Penyerasian Kependudukan			
a. Indikator Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Proyeksi Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Perencanaan Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
L. KELUARGA BERENCANA			
1. Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
a. Pengumpulan dan pengolahan data	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai Kembali
b. Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3. Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
a. Penyiapan fasilitas	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai kembali
b. Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4. Profil dan proyeksi penduduk			
a. Data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
5. Penetapan parameter pengendalian penduduk			

a. Penetapan sasaran parameter	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi sasaran parameter	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
6. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk			
a. Pemanfaatan profil dan proyeksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Pemanfaatan parameter	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
7. Pengembangan Sistem			
a. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
8. Pengembangan Materi			
a. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
9. Monitoring dan Evaluasi			
a. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
b. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
10. Analisis Sosial	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
11. Analisis Ekonomi	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
12. Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
13. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
14. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah			
a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
17. Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18. Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
19. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta			
a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
20. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan			

a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22. Kesertaan keluarga berencana pria			
a. Peningkatan akses keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
23. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24. Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
25. Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
26. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak			
a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
27. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak			
a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
28. Pelembagaan bina ketahanan remaja			
a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
29. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja			
a. Monitoring bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
30. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
31. Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
32. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
33. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
34. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
35. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga			
a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
36. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
37. Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
38. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

39. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
40. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
41. Advokasi dan pencitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
42. Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
a. Promosi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Sarana produksi media komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
c. Produk media komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
43. Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
44. Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
45. Hubungan dengan lembaga nonpemerintah			
a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
46. Tenaga Lini Lapangan			
a. Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
47. Institusi Masyarakat Pedesaan			
a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
48. Mekanisme Operasional lini lapangan			
a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
49. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan			
a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
50. Pengumpulan dan pengolahan data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
51. Analisis dan evaluasi			
a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
52. Sistem aplikasi dan bank data			
a. Pengembangan sistem aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengelolaan bank data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
53. Infrastruktur teknologi informasi			
a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
54. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi			
a. Dokumentasi dan perpustakaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
M. HUBUNGAN MASYARAKAT			

	1. Keprotokolan			
	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Buku tamu Keprotokolan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Agenda kegiatan pimpinan daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Selama berlaku	-	Musnah
	3. Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	1 tahun	1 Tahun	Permanen
	4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan			
	a. Kliping koran	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Brosur/Leaflet/poster/plakat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Pengumuman/pemberitaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5. Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah			
	a. Hubungan antar lembaga pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Hubungan dengan perusahaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Forum Kehumasan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	6. Dengar pendapat/hearing DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	7. Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	8. Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	9. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10. Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	11. Penghargaan/tanda kenang-kenangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	12. Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
VI	PEREKONOMIAN			
	A. KETAHANAN PANGAN			
	1. Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	2. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			
	a. Ketersediaan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Akses Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Kerawanan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3. Distribusi dan Cadangan Pangan			
	a. Distribusi Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Harga Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Cadangan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan			
	a. Konsumsi Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Penganekaragaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen

c. Keamanan Pangan Segar	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan			
a. Dewan Ketahanan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penghargaan Ketahanan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
6. Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	2 tahun	3 tahun	Permanen
7. Bimbingan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
8. Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
B. PERDAGANGAN			
1. Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Perdagangan Dalam Negeri			
a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Bisa Usaha Jasa Perdagangan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
d. Informasi Perusahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pelaku Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Pengembangan Produk Lokal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i. Pencitraan Produk Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j. Pengembangan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
k. Pengelolaan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
l. Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
m. Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
n. Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
o. Informasi Hasil Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
p. Barang Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
q. Bahan Pokok Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
a. Kelembagaan dan informasi standar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
b. Kerjasama Standarisasi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	8 Tahun	Permanen
c. Perumusan dan penerapan standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Tata usaha	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e. Kerjasama, informasi, dan publikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
f. Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
g. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Fasilitas kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
i. Produk pertambangan dan aneka industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j. Produk pertanian, kimia dan kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
k. Jasa	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
l. Kerjasama	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah

m. Sarana dan Kerjasama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
n. Kelembagaan dan dan penilaian	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
o. UTTP dan Standar Ukuran	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
p. Pengawasan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
q. Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
r. Balai Pengujian UTTP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4. Perdagangan Berjangka Komoditi			
a. Pengkajian pasar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Transaksi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
c. Pengawasan Keuangan dan Audit	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
d. Pengkajian pasar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
e. Pengembangan Pasar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
f. Sistem informasi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
g. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
h. Pengawasan pasar lelang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
i. Pengawasan sistem gudang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
5. Bimbingan Teknis	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
6. Evaluasi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
C. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
1. Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
2. Kelembagaan Koperasi dan UKM			
a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun .	3 Tahun	Permanen
b. Tata Laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
c. Keanggotaan Koperasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
d. Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
3. Produksi			

a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kehutanan dan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Perikanan dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4. Pembiayaan			
a. Program Pendanaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Urusan Permodalan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Asuransi dan Jasa Keuangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
5. Pemasaran dan Jaringan Usaha			
a. Perdagangan Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Ekspor dan Impor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Sarana dan Prasarana Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kemitraan dan Jaringan Usaha	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
e. Informasi dan Publikasi Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia			
a. Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Peran Serta Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Advokasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha			
a. Produktifitas dan Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Restrukturisasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Fasilitasi Investasi UKMK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pengembangan Sarana Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8. Pengkajian Sumber Daya UKMK			
a. Penelitian Koperasi	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
b. Penelitian UKM	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
c. Penelitian Sumber Daya	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
d. Pengembangan Perkaderan UMK	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen

9. Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan	3 Tahun	Permanen
10. Pedagang Kaki Lima (PKL)			
a. Peraturan Perundang-Undangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Sarana dan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11. Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
D. KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1. Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Perikanan Tangkap			
a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
b. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
c. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pendaftaran Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
f. Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
g. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
h. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
i. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
j. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
k. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
l. Kelembagaan Usaha Penangkapan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
m. Investasi dan Permodalan Usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
n. Kenelayanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
o. Pembinaan Pengelolaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
p. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
3. Perikanan Budidaya			
a. Potensi Lahan dan Air	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
d. Perbenihan Skala Kecil	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Informasi dan Distribusi Pembenuhan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
f. Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Permanen
g. Budidaya Ikan Hias	2 tahun	3 Tahun	Permanen
h. Sertifikasi Budidaya Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
i. Data dan Statistik Perikanan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Musnah
j. Hama dan Penyakit Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
k. Perlindungan Lingkungan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
l. Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
m. Kewirausahaan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
n. Pelayanan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
o. Kelembagaan dan Ketenagakerjaan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
p. Promosi Usaha dan Budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah

4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
a. Standarisasi Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengembangan Produk	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Industri Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Permanen
f. Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Permanen
g. Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2 tahun	3 tahun	Musnah
h. Pengembangan Industri	2 tahun	3 tahun	Musnah
i. Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Musnah
j. Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
k. Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
l. Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
m. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
n. Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
o. Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
p. Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
q. Pengembangan Ekspor	1 tahun	1 tahun	Musnah
r. Pengembangan Impor	2 tahun	3 tahun	Musnah
s. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
t. Pelayanan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen
u. Kemitraan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen
v. Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
w. Investasi dan Permodalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
x. Informasi dan Promosi	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			
a. Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengawasan Usaha Budidaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Pengawasan Pencemaran Perairan	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
h. Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	2 tahun	3 tahun	Musnah
i. Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1 tahun	1 tahun	Musnah
j. Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1 tahun	1 tahun	Musnah
k. Perawatan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
l. Pengawakan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
m. Sistem Pemantauan	2 tahun	3 tahun	Permanen
n. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 tahun	1 tahun	Musnah
o. Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1 tahun	1 tahun	Musnah
p. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
q. Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
r. Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 tahun	7 tahun	Permanen
s. Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
t. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 tahun	3 tahun	Musnah

6. Karantina Ikan			
a. Pemeriksaan Ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Penahanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengasingan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengamatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pengakuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Penolakan	2 tahun	3 tahun	Musnah
g. Pemusnahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
h. Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	2 tahun	3 tahun	Permanen
i. Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
j. Permohonan Sertifikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
k. Pemasukan Formulir	2 tahun	3 tahun	Musnah
l. Pemasukan Sertifikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
m. Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
n. Surat Perintah	2 tahun	3 tahun	Musnah
o. Rekomendasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
p. Penutupan Suatu Area	2 tahun	3 tahun	Permanen
q. Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
r. Pengawasan Peraturan Perkarantina	3 tahun	7 tahun	Musnah
s. Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3 tahun	7 tahun	Musnah
t. Instalasi Karantina Sementara	2 tahun	3 tahun	Musnah
u. Lokasi Karantina	2 tahun	3 tahun	Musnah
E. PERTANIAN			
1. Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Perlindungan hortikultura			
a. Perlindungan Tanaman Buah	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Perlindungan Tanaman Florikultura	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
3. Perbenihan Hortikultura			
a. Penilaian Varietas	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Mutu Benih	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
a. Basis Data Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengendalian Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Pengelolaan Air Irigasi			
a. Pengembangan Sumber Air	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
6. Pembiayaan Pertanian			

a. Pembiayaan Program	2 tahun setelah data diperbarui/ update	3 tahun	Permanen
b. Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pembiayaan agribisnis	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	2 tahun	3 tahun	Musnah
7. Pupuk Pestisida			
a. Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pupuk Anorganik	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pestisida	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 tahun	3 tahun	Musnah
8. Alat dan Mesin Pertanian			
a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
9. Perbenihan Tanaman Pangan			
a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Produksi Benih Serealia	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kelembagaan Benih	2 tahun	3 tahun	Permanen
10. Budidaya Serealia			
a. Padi Irigasi dan Rawa	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Jagung	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Serealia Lain	2 tahun	3 tahun	Permanen
11. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
a. Kedelai	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Ubi Kayu	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
12. Tanaman Pangan			
a. Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Dampak Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	2 tahun	3 tahun	Permanen
13. Pascapanen Tanaman Pangan			
a. Padi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Jagung dan Serealia alin	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kedelai dan Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
14. Pengolahan Hasil Pertanian			
a. Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Holtikultura	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
15. Mutu dan Standarasi			
a. Standardisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen

b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Akreditasi dan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kerjasama dan Harmonisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
16. Pengembangan Usaha dan Investasi			
a. Kemitraan dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Investasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Promosi Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Promosi Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
17. Pemasaran Domestik			
a. Informasi Pasar	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Jaringan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
18. Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan - Rencana Kerja - TOR/ Proposal - Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	2 tahun	3 tahun	Permanen
19. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			
a. Hasil Penelitian dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	2 tahun	3 tahun	Permanen
20. Diseminasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
21. Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian			
a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	2 tahun	3 tahun	Permanen
22. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
23. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
24. Data Penelitian dan Pengembangan	2 tahun setelah data dipebarui/update	8 tahun	Permanen
25. Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Permanen
26. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
a. Hak Cipta	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
b. Hak Paten Sederhana	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
c. Hak Paten Biasa	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
d. Hak Merek	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
e. Pendaftaran Varietas Tanaman	1 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	1 tahun	Musnah
f. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
g. Permohonan HKI yang ditolak	2 tahun	1 tahun	Musnah
27. Pelayanan Perijinan Pertanian			
a. Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	2 tahun	3 tahun	Permanen

b. Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	2 tahun	3 tahun	Permanen
28. Pelayanan Hukum			
a. Sertifikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pertimbangan Hukum	2 tahun	8 tahun	Permanen
29. Karantina Pertanian			
a. Karantina Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Karantina Hewan	2 tahun	3 tahun	Musnah
30. Bimbingan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
31. Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
F. PETERNAKAN			
1. Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Peternakan dan Kesehatan Hewan			
a. Perbibitan Ternak - Produksi Bibit Ternak Ruminansia - Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia - Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak - Pengembangan Bibit Ternak - Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pakan Ternak	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Budidaya Ternak	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kesehatan Hewan - Pengamatan Penyakit Hewan - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan - Perlindungan Hewan - Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan - Pengawasan Obat Hewan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen - Pascapanen - Higien Sanitasi - Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan - Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan - Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan - Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
3. Bimbingn Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
G. PERKEBUNAN			
1. Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Tanaman Semusim			
a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Perbenihan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah

c. Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pemberdayaan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
3. Tanaman Rempah & Penyegar			
a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Tanaman Tahunan			
a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Perbenihan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Budidaya Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Perlindungan Perkebunan			
a. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
6. Pascapanen dan Pembinaan Usaha			
a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pascapanen Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	2 tahun	3 tahun	Permanen
7. Bimbingan Teknis Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
8. Evaluasi Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
H. PERINDUSTRIAN			
1. Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Iklim Usaha dan Kerja Sama			
a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
3. Promosi Industri			
a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Promosi Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
4. Standarisasi dan Teknologi			
a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
5. Hak atas Kekayaan Intelektual			

a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
6. Industri Hijau			
a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
7. Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
8. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11. Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
12. Standarisasi			
a. Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Penyiapan Penerapan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Infrastruktur Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
13. Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri			
a. Kebijakan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Perpajakan dan Tarif	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Pengembangan Model Industrial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
14. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup			
a. Industri Hijau	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
15. Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual			
a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
16. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
I. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1. Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Rekomendasi Kegeologian			
a. Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Geosains	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f. Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g. Kelayakan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3. Penelitian Kegeologian			
a. Administrasi pelaksanaan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Administrasi tenaga penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Administrasi penggunaan peralatan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

d. Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e. Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
f. Sumber Daya Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
g. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
h. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
i. Survei Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
4. Inventarisasi dan evaluasi kegeologian			
a. Sumber Daya Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5. Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi			
a. Peta potensi dan sebaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6. Bioenergi			
a. Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Evaluasi/Revisi HIP BBN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Database Perusahaan Bioenergi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i. Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
7. Aneka Energi			
a. Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penetapan Kapasitas Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8. Konservasi Energi			
a. Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d. Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h. Profil investasi efisiensi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

i. Invesment Grade Audit (IGA)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j. Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE			
a. Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
d. Evaluasi Program Kerja	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
10. Bina Program Tenaga Listrik			
a. Investasi dan pendanaan tenaga listrik - Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri - Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik - Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik - Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Pengembangan listrik pedesaan - Data program listrik pedesaan - Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) - Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Data dan Informasi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
11. Bina Usaha Ketenagalistrikan			
a. Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan - Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL) - Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan - Data laporan berkala pemegang Izin	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
b. Harga dan Subsidi Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Hubungan komersial tenaga listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Perlindungan konsumen listrik - Penanganan pengaduan konsumen listrik - Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik - Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik - Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan			
a. Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Usaha penunjang ketenagalistrikan - Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) - Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika) - Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan - Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik - Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan - Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan - Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20. Sertifikasi			

a. Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Permanen
b. Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Permanen
c. Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlakunya	3 Tahun	Permanen
d. Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Registrasi Sertifikasi	2 Tahun setelah masa berlaku	3 Tahun	Permanen
13. Akreditasi Ketenagalistrikan	2 Tahun setelah masa berlaku	3 Tahun	Permanen
14. Standarisasi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
15. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan			
a. Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
16. Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan			
a. Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
b. Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
c. Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
d. Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
e. Laporan hasil pengawasan penunjukan	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
17. Pembinaan Pengusahaan Mineral			
a. Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
d. Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
e. Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
f. Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
g. Perizinan usaha pertambangan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
h. Kontrak Karya (KK)	2 Tahun setelah diperpanjang	3 Tahun	Permanen
i. Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
k. Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
l. Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
m. Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
n. Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
o. Pelaporan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

p. Penghargaan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
q. Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Sepanjang tidak ada sengketa	5 Tahun	Permanen
18. Program Penelitian dan Pengembangan			
a. Rencana Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
h. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i. Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
k. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
l. Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
m. Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
19. Sarana Litbang			
a. Administrasi penggunaan peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	1 Tahun setelah peralatan dihapus	5 Tahun	Permanen
20. Afiliasi			
a. Proyek Percontohan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Penyajian Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
21. Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan			
a. Energi baru terbarukan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Teknologi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Lingkungan dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
J. PERHUBUNGAN			
1. Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Jaringan Prasarana dan Pelayanan			
a. Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Penetapan lokasi terminal barang utama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

e.	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g.	Penetapan kelas jalan primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
h.	Kualifikasi teknis petugas terminal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i.	Jaringan transportasi jalan sekunder	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Pengembangan Transportasi Jalan			
a.	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pengembangan transportasi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor			
a.	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Teknologi Kendaraan Bermotor			
a.	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
a.	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7.	Perlengkapan Jalan			
a.	Pedoman teknis perlengkapan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8.	Angkutan Penumpang			
a.	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c.	Izin trayek antar kota antar provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
e.	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
f.	Pemberian subsidi angkutan umum	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
g.	Angkutan perintis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
h.	Penghargaan perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9.	Angkutan Barang			
a.	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Tarif angkutan barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Izin operasi angkutan barang tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Pembinaan angkutan barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e.	Izin dispensasi angkutan jalan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
10.	Monitoring Operasional			

	a. Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Berkas Pelanggaran Perda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11.	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	a. Pedoman Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Bimtek PPNS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12.	Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen
	b. Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
13.	Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14.	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
15.	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
	a. Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16.	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
17.	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18.	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Manajemen lalu lintas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
19.	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20.	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

21. Tarif dan Keperintisan			
a. Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22. Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
a. Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
23. Lalu Lintas Perkotaan			
a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
24. Angkutan Perkotaan			
a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Jaringan trayek perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
25. Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan			
a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
26. Dampak Transportasi Perkotaan			
a. Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
d. Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Masterplan transportasi perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
27. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan			
a. Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kualifikasi unit pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
28. Pengembangan Keselamatan			
a. Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Harmonisasi kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
29. Promosi dan Kemitraan Keselamatan			
a. Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

b. Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
30. Bina Keselamatan Angkutan Umum			
a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
31. Audit Keselamatan			
a. Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
32. Inspeksi Keselamatan			
a. Pedoman keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
33. Parkir			
a. Surat Tugas Juru Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Izin tempat khusus parkir swasta	Berlaku selama masih digunakan	3 Tahun	Musnah
c. Surat Tugas TKP Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
K. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1. Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Telekomunikasi			
a. Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Kelayakan Sistem Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3. Penyiaran			
a. Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal			
a. Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5. Pengendalian Informatika			
a. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6. e- Government			
a. Tata Kelola e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah

b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Aplikasi Layanan Pemerintahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Aplikasi Layanan Publik	2 tahun	3 tahun	Musnah
7. e- Business			
a. Tata Kelola e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Teknologi dan Infrastruktur e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Aplikasi Layanan e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
8. Pemberdayaan Informatika Masyarakat			
a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
9. Pemberdayaan Industri Informatika			
a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Industri Perangkat Lunak	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Industri Konten Multimedia	2 tahun	3 tahun	Musnah
10. Keamanan Informasi			
a. Tata Kelola Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Teknologi Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Penyidikan dan Penindakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Budaya Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
11. Komunikasi Publik			
a. Tata Kelola Komunikasi Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengelolaan Opini Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Layanan Komunikasi Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
12. Pengolahan dan Penyediaan Informasi			
a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
b. Informasi Perekonomian	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
c. Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
13. Pengelolaan Media Publik			
a. Media Cetak	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
b. Media Online	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
c. Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
14. Kemitraan Komunikasi			
a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah

b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
15. Infrastruktur Informatika			
a. Jaringan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Piranti Teknologi Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Keamanan Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
16. Sistem dan Data			
a. Portal dan Konten	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan Aplikasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
17. Pusat Kerjasama			
a. Kerja Sama daerah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
b. Kerja Sama Bilateral	2 tahun	3 Tahun	Permanen
18. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat			
a. Pelayanan Informasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
b. Hubungan Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
c. Bimbingan Teknis	2 tahun	3 Tahun	Musnah
19. Evaluasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
L. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1. Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pengembangan Destinasi Wisata			
a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Industri Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Pemasaran Pariwisata			
a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Promosi Pariwisata Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Pencitraan Indonesia	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya			
a. Pengembangan industri Perfilman	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pengembangan Seni Rupa	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK			
a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Desain dan Arsitektur	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kerjasama dan Fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen

6. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
M. STATISTIK			
1. Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi			
a. Perencanaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Persiapan	1 tahun	1 tahun	Musnah
- Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus			
- Penyusunan Kuesioner			
- Penyusunan konsep dan definisi			
- Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur)			
- Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan)			
- Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah			
- Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan)			
- Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern)			
- Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas			
- Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi)			
- Pelatihan petugas pengolahan			
- Perancangan tabel			
- Pelaksanaan Ujicoba			
c. Pelaksanaan Lapangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
d. Pengolahan	1 tahun	1 tahun	Musnah
- Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching)			
- Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding)			
- Perekaman data (entri, scanner)			
- Tabulasi Data			
- Pemeriksaan tabulasi			
- Laporan konsistensi tabulasi			
e. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	1 tahun	1 tahun	Musnah
f. Diseminasi hasil sensus	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Survei			
a. Perencanaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Persiapan	1 tahun	1 Tahun	Permanen
c. Pelaksanaan Lapangan	1 tahun	1 Tahun	Permanen
- Pelaksanaan listing			
- Pemilihan sampel			
- Pengumpulan data			
- Pemeriksaan			
- Pengawasan Lapangan			
- Monitoring kualitas			

d. Pengolahan	1 tahun	1 Tahun	Musnah
- Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/Batching)			
- Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding)			
- Perekaman data (entri, scanner)			
- Tabulasi Data			
- Pemeriksaan tabulasi			
- Laporan konsistensi tabulasi			
e. Analisis dan Penyajian Hasil Survei	1 tahun	1 Tahun	Musnah
- Pembahasan angka hasil pengolahan			
- Penyusunan angka sementara			
- Penyusunan angka tetap			
- Penyusunan/pembahasan draft publikasi			
- Analisis data			
- Penyusunan publikasi			
f. Diseminasi hasil Survei	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Konsolidasi Data Statistik			
a. Kompilasi Data	1 tahun	1 Tahun	Musnah
b. Analisis data	1 tahun	1 Tahun	Musnah
c. Penyusunan Publikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	2 tahun	3 tahun	Permanen
N. KETENAGAKERJAAN			
1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Perencanaan Tenaga Kerja			
a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Pengembangan Standarisasi Kompetensi			
a. Penerapan Standar Kompetensi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengembangan Standarisasi Kompetensi	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			
a. Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	3 tahun setelah kerjasama selesai dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Permanen
5. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan			
a. Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
6. Bina Pemagangan			
a. Pemagangan Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah

	b. Pemagangan Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
7.	Produktivitas dan Kewirausahaan			
	a. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pengembangan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
8.	Pengembangan Pasar Kerja			
	a. Informasi Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Analisis Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Bursa Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Analisis Jabatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
9.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
	a. Ant Antar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
10.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal			
	a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pengembangan Padat Karya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Terapan Teknologi Tepat Guna	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	2 tahun	3 tahun	Musnah
11.	Standardisasi Profesi			
	a. Sistem Informasi dan Registrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pembakuan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
12.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi			
	a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Perjanjian Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Kesejahteraan Pekerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
13.	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial			
	a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Kelembagaan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pemasarakatan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
14.	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
	a. Pengupahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
15.	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial			
	a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
16.	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	a. Pengawasan Norma Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2 tahun	3 tahun	Musnah

c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
17. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Norma Kerja Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Kerjasama Lintas Sektoral	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
18. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	2 tahun	3 tahun	Musnah
19. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
20. Bina Penegakan Hukum			
a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Kerjasama Penegakan Hukum	2 tahun	3 tahun	Musnah
21. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
a. Analisis dan Standardisasi bidang K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
22. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
a. Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
f. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
O. PENANAMAN MODAL			
1. Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Perencanaan Penanaman Modal			
a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Perencanaan Industri Manufaktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Perencanaan Jasa dan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Perencanaan Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
3. Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
a. Deregulasi Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
b. Pengembangan Potensi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
c. Pemberdayaan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Promosi Penanaman Modal			

a. Pengembangan Promosi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Analisis Strategi Promosi	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Promosi Sektoral	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Fasilitasi Promosi Daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Pameran dan Sarana Promosi	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Kerja Sama Penanaman Modal			
a. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Kerja Sama Regional	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
a. Pemantauan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Data Realisasi Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Pengawasan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
f. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
7. Pelayanan Penanaman Modal			
a. Pelayanan Aplikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pelayanan Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pelayanan Konsultasi Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Pelayanan Non Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Pelayanan Fasilitas	2 tahun	3 tahun	Permanen
P. PERTANAHAN			
1. Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan			
a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Data dan Informasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Advokasi dan Pengendalian	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah			
a. Penatagunaan Tanah	2 tahun setelah ijin tidak berlaku	3 tahun	Musnah
b. Data dan Pemetaan Tematik	2 Tahun setelah Data diperbarui	3 tahun	Permanen
c. Penguatan Atas Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Sengketa Tanah			
a. Pengkajian dan Penanganan Sengketa	2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
b. Advokasi dan Pengendalian	2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
Q. TRANSMIGRASI			
1. Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen

2. Penyediaan Tanah Transmigrasi			
a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengurusan Legalitas Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Dokumentasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Advokasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
a. Penyiapan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penyiapan Sarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Penyiapan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Evaluasi Kelayakan Permukiman	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi			
a. Penyiapan Calon Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penyiapan Perpindahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pelaksanaan Perpindahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Penataan dan Adaptasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Partisipasi Masyarakat			
a. Promosi dan Motivasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Kerjasama Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kerjasama Antar Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Pelayanan Investasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
6. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi			
a. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Bina Sistem Informasi	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
c. Perencanaan Pengembangan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
e. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat			
a. Bantuan Pangan dan Kesehatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Fasilitas Sosial Budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
8. Pengembangan Usaha			
a. Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Produksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Lembaga Ekonomi dan permodalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan			
a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pengembangan Sarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Pengembangan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
10. Penyerasian Lingkungan			

	a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
VII	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
	A. PEKERJAAN UMUM			
	1. Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Penatagunaan Sumber Daya Air			
	a. Perencanaan Wilayah Sungai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Pemanfaatan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pengaturan dan Pemantauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			
	a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Informasi dan Data Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Keterpaduan Pemrograman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Pengelolaan Sumber Daya Air			
	a. Pengelolaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengelolaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			
	a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Pengembangan Jaringan Jalan			
	a. Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sistem Jaringan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. Pembangunan Jalan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Manajemen Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8. Preservasi Jalan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	
	b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Teknik Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

9. Pengelolaan Jembatan			
a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Teknik Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
10. Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah			
a. Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11. Pengaturan Jalan Tol			
a. Persiapan pengusaha jalan tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengadaan Investasi Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
c. Teknik Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
12. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
13. Pengembangan Kawasan Permukiman			
a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Kawasan Permukiman Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14. Pembinaan Penataan Bangunan			
a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penataan Bangunan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengelolaan Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
g. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman			
a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengelolaan Air Limbah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengelolaan Persampahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
17. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
B. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			

1. Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Perencanaan Pembiayaan Perumahan			
a. Keterpaduan Perencanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Kemitraan	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Pola Pembiayaan Perumahan			
a. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pola Investasi Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
4. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			
a. Sumber Pembiayaan Primer	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Sumber Pembiayaan Sekunder	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Sistem Pembiayaan Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
5. Perencanaan Penyediaan Perumahan			
a. Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Analisa Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6. Penyediaan Rumah Susun			
a. Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Penyediaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7. Penyediaan Rumah Khusus			
a. Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
d. Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	2 tahun	3 tahun	Permanen
e. Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
f. Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
g. Pelaksanaan Bantuan Simultan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
8. Penyediaan Rumah Umum dan Komersial			
a. Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pemberian Bantuan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Fasilitas Hunian Berimbang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
9. Investasi Infrastruktur			
a. Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Pasar Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
10. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
a. Sistem Penyelenggaraan	2 tahun	3 tahun	Musnah

b. Kontrak Konstruksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Konstruksi Berkelanjutan	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Manajemen Mutu	2 tahun	3 tahun	Musnah
11. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
a. Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b. Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
d. Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
12. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
a. Standar dan Materi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Penerapan Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Pengembangan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
13. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
a. Peningkatan Kerjasama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
14. Peningkatan Jasa Konstruksi			
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
15. Penerapan Teknologi Konstruksi			
a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengembangan Materi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)			
a. Antar Sektor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Antar Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
17. Pengembangan Kawasan Strategis			
a. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18. Pengembangan Kawasan Perkotaan			
a. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
d. Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
19. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
C. TATA RUANG (TATA KOTA)			
1. Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Perencanaan			
a. Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
c. Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen

d. Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
e. Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
f. Rencana Teknis Prasarana Kota	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
g. Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
3. Pemanfaatan dan Pengendalian			
a. Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
b. Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
c. Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
4. Pemetaan			
a. Peta Dasar	1 tahun	1 tahun	Permanen
b. Survey Pemetaan Ruang Darat	1 tahun	1 tahun	Musnah
c. Survey Pemetaan Ruang Air	1 tahun	1 tahun	Musnah
d. Survey Pemetaan Ruang Udara	1 tahun	1 tahun	Musnah
D. LINGKUNGAN HIDUP			
1. Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
a. Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
a. Evaluasi Penerapan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Perencanaan Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
4. Ekonomi Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
5. Dampak Lingkungan			
a. Bimtek Dampak Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
6. Pemantauan dan Pengawasan			
a. Manufaktur Prasarana dan Jasa	3 tahun	7 tahun	Permanen
b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3 tahun	7 tahun	Permanen
d. Udara Sumber Bergerak	3 tahun	7 tahun	Permanen
7. Evaluasi dan Pengembangan			
a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa	2 tahun	3 tahun	Musnah
b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	2 tahun	3 tahun	Musnah
c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
d. Udara Sumber Bergerak	2 tahun	3 tahun	Musnah
8. Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan			
a. Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Keamanan Hayati	2 tahun	3 tahun	Permanen

e. Pengendalian kerusakan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
9. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat			
a. Kerusakan Ekosistem	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Rawa	2 tahun	3 tahun	Permanen
10. Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer			
a. Perangkat mitigasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 tahun	1 tahun	Musnah
c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
11. Adaptasi Perubahan Iklim			
a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim - Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim - Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Kerentanan Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
12. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
a. Registrasi dan Notifikasi	1 tahun	1 tahun	Permanen
b. Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 tahun	1 tahun	Permanen
13. Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun			
a. Pengumpulan dan pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Pengangkutan dan Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Penimbunan dan Dumping	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	2 tahun	3 tahun	Permanen
14. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3			
a. Pemantauan	1 tahun	1 tahun	Musnah
b. Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
15. Pengelolaan Sampah			
a. Pembatasan sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
c. Pembentukan Dewan Adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
d. Penetapan pemenang adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
16. Hukum Administrasi Lingkungan			
a. Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	1 tahun	1 tahun	Musnah
b. Penataan hukum administrasi lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan			
a. Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
b. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
18. Penegakan hukum pidana lingkungan			
a. Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
b. Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
c. Koordinasi pembinaan penyidik PNS	3 tahun	7 tahun	Musnah
19. Komunikasi Lingkungan			

	a. Pengembangan Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Publikasi dan Kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
	20. Penguatan Inisiatif Masyarakat			
	a. Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Kearifan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	21. Peningkatan Peran Masyarakat			
	a. Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	22. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan			
	a. Organisasi Sosial Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Organisasi Profesi Dunia Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	23. Data dan Informasi Lingkungan			
	a. Pengelolaan Data	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Pengelolaan Informasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Pengembangan Perangkat Lunak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d. Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	24. Kelembagaan Lingkungan			
	a. Kelembagaan dan Tata Laksana	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 tahun	3 tahun	Permanen
	25. Standarisasi dan teknologi			
	a. Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Teknologi Ramah Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	26. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan			
	a. Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2 tahun	3 tahun	Permanen
VIII	PENGAWASAN			
	A. PENGAWASAN INTERNAL			
	1. Rencana Pengawasan			
	a. Rencana Strategis Pengawasan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Rencana Kerja Pengawas Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2. Pelaksanaan Pengawasan			
	a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	2 Tahun setelah tindak lanjut selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
	c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen

	d. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	2 Tahun setelah proses data di update	3 Tahun	Permanen
	f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
IX	KEPEGAWAIAN			
	A. SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara			
	a. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan - Pengolahan Data Kebutuhan	2 Tahun sejak data diperbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	b. Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama	3 Tahun	Musnah
	d. Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	2 Tahun sejak standar baru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	2. Formasi dan Pengadaan Pegawai			
	a. Formasi ASN (antara lain: - Usulan formasi - Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN - Persetujuan Formasi - Penetapan Formasi - Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	b. Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN - Proses Rekrutmen ASN - Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama	3 Tahun	Musnah
	c. Pengumuman Kelulusan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Pengangkatan ASN	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	f. Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Mutasi Pegawai			

a.	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
b.	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
c.	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
d.	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
e.	Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
f.	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Pengembangan Karir			
a.	Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
b.	Penyesuaian ijazah	1 Tahun sejak data diperbarui (update)	1 Tahun	Musnah
c.	Penyusunan Sistem Karier	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama	3 Tahun	Musnah
d.	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
e.	Angka Kredit antara lain: - Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit - Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
5.	Kinerja Aparatur Sipil Negara			
a.	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
b.	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Permanen
c.	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN			

a. Kode Etik Pegawai	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
b. Disiplin	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
c. Pemberhentian Dengan Hormat	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
e. Pemberhentian Sementara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
f. Pensiun ASN - Administrasi Pensiun ASN - Penetapan Pensiun ASN - Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN - Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
7. Bantuan Hukum	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Musnah
8. Status dan Kedudukan Pegawai			
a. Status Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
b. Kedudukan Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
c. Keberatan Pegawai	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9. Sistem Informasi Kepegawaian			
a. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah

b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Permanen
d. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1 Tahun sejak dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
10. Pengawasan dan pengendalian			
a. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
f. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honororer	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
11. Administrasi Pegawai			
a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
b. Cuti Sakit	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
c. Cuti Bersalin	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
d. Cuti Tahunan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
e. Cuti Alasan Penting	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
f. Cuti Besar	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
g. Cuti Di luar Tanggungan Negara	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
h. Karpeg/KPE/Karis/Karsu	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
i. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
j. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
k. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah

1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
m. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
12. Kesejahteraan Pegawai			
a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
b. Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
c. Tabungan Perumahan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
d. Bantuan Sosial	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
e. Pakaian Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
f. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
g. Pemberian Tali Kasih	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
h. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
i. Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
j. Rekam Medis	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
13. Administrasi Perseorangan			
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah
c. Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
d. Sekretaris Daerah	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
e. ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
14. Penilaian Kompetensi			
a. Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
b. Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1. Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2. Pendidikan dan Pelatihan			

	a. Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Permanen
	b. Pedoman-pedoman kediklatan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	c. Kurikulum-kurikulum diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Modul-modul diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Panduan fasilitator	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	g. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	h. Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	i. Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	3. Widyaiswara			
	a. Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Sertifikasi Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	c. Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	d. Penilaian Widyaiswara	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	e. Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	f. Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	4. Penyelenggaraan Diklat			
	a. Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	c. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Sistem informasi diklat	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	f. Monitoring Penyelenggara Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Alumni	2 tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen
X	KEUANGAN			
	A. KEUANGAN DAERAH			
	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)			
	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	2 tahun	3 tahun	Permanen

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2 tahun	3 tahun	Permanen
2. Penyusunan Anggaran			
a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
b. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 tahun	3 tahun	Permanen
3. Pelaksanaan Anggaran			
a. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
b. Pendapatan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
c. Belanja	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
d. Pembiayaan Daerah	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
e. Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
g. Daftar Gaji	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
h. Kartu Gaji	Selama yang bersangkutan masih jadi pegawai	3 tahun	Musnah
j. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
k. Laporan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			
a. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	1 tahun setelah Diterbitkan	3 tahun	Permanen
b. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani	3 tahun	Permanen
c. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen

d.	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
e.	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri - Usulan luncuran dana	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
f.	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
g.	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Musnah
h.	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri - Surat Perintah Pencairan Dana - SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Musnah
i.	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) - No Objection Letter (NOL) - Project Implementation - Notification of Contract - Withdrawal Authorization (WA)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
j.	Staff Appraisal Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
k.	Report /Laporan	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
l.	Laporan Hutang Daerah	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
m.	<i>Completion Report/Annual Report</i>	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
n.	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun	Permanen
5.	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Selama masih menjabat	3 tahun	Permanen
6.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)			
a.	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
b.	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
c.	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
d.	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
7.	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan			
a.	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

	b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) - SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak - Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	c. Buku Rekening Bank	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	d. Keputusan Pembukuan Rekening	Selama rekening masih aktif	1 tahun	Permanen
	e. Pembukuan anggaran terdiri - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Pembantu - Register dan Buku Tambahan - Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP) - Daftar Himpunan Pencairan (DHP) - Rekening Koran	Selama rekening masih aktif	5 tahun	Musnah
	8. Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan			
	a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	b. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	9. Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD - Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, - Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, - Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas - Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu - Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota - Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD - Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada - Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD - Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	10. Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu			
	a. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	b. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

c. Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
d. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
11. Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah			
a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
d. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi	3 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
12. Anggaran Daerah			
a. Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
13. Pendapatan dan Investasi Daerah			
a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
b. Badan Usaha Milik Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan - Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Badan Layanan Umum Daerah - Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah - Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

	<p>d. Pengelolaan Kekayaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan - Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>e. Pinjam Dan Obligasi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN - Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>14. Fasilitasi Dana Perimbangan</p>			
	<p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum - Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyiapan data dasar - Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus - Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam - Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus - Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, - Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, - Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>15. Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p>			
	<p>a. Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah 	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	1 tahun	2 tahun	Musnah
d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli - Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangandaerah - Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah - Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 tahun	3 Tahun	Permanen

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat

u.b.
 Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
 Penata Tingkat I
 NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 39 TAHUN 2023
 TANGGAL : 8 - 9 - 2023

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN KEDIRI**

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMAMAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	000 UMUM				
	000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
	000.1.1 Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
	000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri				
	000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.5 Rapat Pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.6 Penyediaan Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas				
	000.1.7.1 Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

000.1.7.2	Pemeliharaan dan Perbaikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.7.3	Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor				
000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.8.2	Penghijauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.8.3	Perbaikan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer				
000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.9.2	Pemasangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan				
000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2	PERLENGKAPAN				
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan				

000.2.1.1	Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2.1.2	Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2.2	Pemeliharaan Peralatan Kantor				
000.2.2.1	Data Hasil Pemeliharaan Kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2.2.2	Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2.3	Distribusi				
000.2.3.1	Barang Habis Pakai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2.3.2	Barang Milik Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk didalamnya Proses Lelang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.3 PENGADAAN					
000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4 PERPUSTAKAAN					

000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.3	Koleksi Pustaka				
000.4.3.1	Pembelian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.3.2	Hibah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.3.3	Hadiah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.3.4	Tukar Menukar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.3.6	Terbitan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.6	Layanan Perpustakaan				
	000.4.6.1	Keanggotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.6.2	Peminjaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan				
	000.4.7.1	MoU	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	000.4.7.2	Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	000.4.7.3	Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan				
	000.4.8.1	Pengembangan Situs Web	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

000.4.8.2	Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.8.3	Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.8.4	Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.10	Konservasi				
000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.12	Transformasi Digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.13	Kurasi Digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan				
000.4.14.1	Perpustakaan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5	KEARSIPAN				

000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
000.5.2	Pembinaan Kearsipan				
000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.5	Data Base Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis				
000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.6	Penyusutan Arsip				
000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis				
000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis				

000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media))	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.7	Preservasi Kuratif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.15	Pengawasan Kearsipan				
000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.5.15.3	Sanksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
000.6 PERSANDIAN					
000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.6.2	Pengamanan persandian				
000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi				
000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.6.3.3	Pelaksanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	000.6.3.4	Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian				
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik				
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	000.6.5.7	Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang				
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.1.6	Musrenbang Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah				
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.6	Program Kerja Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.8	Laporan Berkala	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.9	Laporan Insidental	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.2.10	Evaluasi Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.6	Aksi Strategis Daerah				
000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan				
000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.7.2	Pendanaan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
000.8.1.1	Pembentukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.1.2	Pengubahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.1.3	Pembubaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja				

000.8.2.1	Analisa Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.3	Ketatalaksanaan				
000.8.3.1	Proses Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.3.2	Standar Pelayanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.3.4	Pelayanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi				
000.8.6.1	Budaya Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN					
000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	000.9.6.1	Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.9.6.2	Statistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
II	100 PEMERINTAHAN					
	100.1 OTONOMI DAERAH					
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				
	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				
100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2 PEMERINTAHAN UMUM					
100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama				
100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3 HUKUM					
	100.3.1	Program Legislasi				
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.1.2	Program Legislasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah				
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran				
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II dan III	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.5	Surat Perintah				
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II dan III	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama				
100.3.7.1	Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.3.7.2	Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum				
100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
100.3.11.4	Perburuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.11.5	Arbitrase	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
100.3.11.6	Sengketa Adat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.12	Perijinan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				

100.3.13.1	Hak Cipta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.13.2	Hak Paten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.13.3	Hak Desain Industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.13.5	Hak Merk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

III	200 POLITIK					
	200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.2.3	Bela Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.3 Kewaspadaan Nasional					
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Masyarakat				
	200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.4.4	Organisasi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.4.5	Masalah Sosial Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5	<u>Politik Dalam Negeri</u>				
200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.6	Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.7	Database Parpol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.5.9	Pemilihan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
200.1.6	Ketahanan Ekonomi				

	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
IV	300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
	300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja				
	300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
300.1.4	Perlindungan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN					
300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan				
300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.2.6	Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan				
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.5.3	Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.5.4	Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.8	Operasi Komunikasi				
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.8.3	Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi				
	300.2.12.1	Laporan Harian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.12.2	Laporan Bulanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.12.3	Laporoan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	300.2.12.4	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
V	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum				
	400.2.2.1	Data gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)				
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)				
400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.2.4.2	Data perlindungan anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)				
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3 PENDIDIKAN					
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal				
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.2.4	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat				
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3.3	Pembinaan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3.5	Pameran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3.6	Rakor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3.7	Sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama				
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.5.2	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus				
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.6.2	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.6.3	Lomba, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.6.5	Pendataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.6.6	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	400.3.7.7	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus				
	400.3.9.1	Bahan ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.3	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.8	Pendataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.10.3	Setifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.3.10.7	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.3.11	Penilaian Pendidikan				
400.3.11.1	Penilaian Akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan				
400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan				
400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4 KEOLAHRAGAAN					
400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan				
400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi				
400.4.3.1	Olahraga Massal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.3.2	Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga				
400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus				
400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.5.2	Layanan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga				
400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga				
400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.7.2	Kompetisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan				
400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga				
400.4.9.1	Industri Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.9.2	Promosi Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.10	Olahraga Prestasi				
400.4.10.1	Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.10.2	Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.10.3	Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga				
400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5 KEPEMUDAAN					
400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda				
400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.2.3	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda				
400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda				
400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)				
400.5.5.1	Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.5.2	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda				
400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.7	Kewirausahaan				
400.5.7.1	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.7.2	Pengaderan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.7.3	Perintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan				
400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda				
400.5.9.1	Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda				
400.5.10.1	Kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6	KEBUDAYAAN				

400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman				
400.6.2.1	Registrasi Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.2.2	Pelindungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman				
400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya				
400.6.4.1	Sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.4.2	Pemetaan nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya				
400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7 KESEHATAN					
400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar				
400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.7.2.9	Pembiayaan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan				
400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik				
400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan				
400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.5.2	Patologi dan toksilologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.5.3	Radiologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.6	Kesehatan Jiwa				

400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkoba dan sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait
400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra				
400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.7.7.2	Imunisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.7.4	Kesehatan matra	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.8	<u>Pengendalian penyakit menular langsung</u>				
400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.9	<u>Pengendalian penyakit bersumber binatang</u>				
400.7.9.1	Pengendalian malaria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.10	<u>Pengendalian penyakit tidak menular</u>				
400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.7.10.3	Penyakit kanker	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.11	Penyehatan lingkungan				
400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.13	Gizi				
400.7.13.1	Gizi makro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.13.2	Gizi mikro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.14	Kesehatan ibu				

400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.14.4	Keluarga berencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.15	Kesehatan anak				
400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer				
400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga				

400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.17.2	Kapasitas kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.17.3	Lingkungan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.17.6	Kesehatan olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan				
400.7.18.1	Harga obat publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.18.2	Pengadaan obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan				
400.7.19.1	Alat kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.20	Kefarmasian				
400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.20.2	Farmasi klinis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.7.20.3	Farmasi Komunitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian				
400.7.21.1	Obat tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan				
400.7.22.1	Surat keterangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan				
400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan				
400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.25	Intelegensia Kesehatan				
400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.26	Kesehatan Haji				
400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.27	Promosi Kesehatan				
400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.27.4	Hari kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.28	Data dan Informasi				
400.7.28.1	Statistik kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen				
400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya				
400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.7.31	Rekam Medis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN					
400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.8.2	Fasilitasi				
400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.8.2.4	Kasus Keagamaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME				
400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9	SOSIAL				
400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak				
400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.3	Rehabilitasi Sosial				
400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial				
400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
400.9.4.3	Warga binaan lembaga pasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia				

400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				
400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.10.4	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.11	Jaminan Sosial				
400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.11.4	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial				
400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil				
400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan				
400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.14.5	Bantuan Langsung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial				

400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.4	Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
	400.10.4.1	Budaya Nusantara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat				
	400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan				
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN					
400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.2	Pertamanan				
400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.2.2	Taman Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.3	Pemakaman				
400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.3.2	Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.4	Jalur Hijau				
400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.5	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.7	Pengelolaan Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.2	Pendaftaran Penduduk				
400.12.2.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.3	Pencatatan Sipil				
400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				

400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan				
400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.5.2	Kualitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.6	Penyerasian Kependudukan				

400.12.6.1	Indikator Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13 KELUARGA BERENCANA					
400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk				
400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk				
400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk				
400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.7	Pengembangan Sistem				
400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.8	Pengembangan Materi				
400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi				
400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.10	Analisis Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.11	Analisis Ekonomi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah				
400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta				
400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan				
400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				
400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria				
400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak				
400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak				
400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja				
400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja				
400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga				
400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.41	Advokasi dan pencitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi				
400.13.42.1	Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.42.3	Produk media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.44	<u>Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota</u>				
400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.45	<u>Hubungan dengan lembaga nonpemerintah</u>				
400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.46	Tenaga Lini Lapangan				

400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan				
400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan				
400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan				
400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.51	Analisis dan evaluasi				
400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data				
400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.52.2	Pengelolaan bank data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi				

400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi				
400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT					
400.14.1	Keprotokolan				
400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.2	Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan				
400.14.4.1	Kliping koran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah				
400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.5.5	Forum Kehumasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
VI	500 PEREKONOMIAN					
	500.1 KETAHANAN PANGAN					
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.1.2.2	Akses Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.2.3	Kerawanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan				
500.1.3.1	Distribusi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.3.2	Harga Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.3.3	Cadangan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan				
500.1.4.1	Konsumsi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan				
500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.7	Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.1.8	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2	PERDAGANGAN				
500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri				

500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
500.2.2.5	Pelaku Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	500.2.2.14	Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.2.16	Barang Strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.4	Tata usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.2.3.11	Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.2.3.12	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.3.16	Pengawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi				
500.2.4.1	Pengkajian pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4.4	Pengkajian pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4.5	Pengembangan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4.6	Sistem informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.5	Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.2.6	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM				
500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.3	Produksi				
500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.4	Pembiayaan				
500.3.4.1	Program Pendanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.4.3	Urusan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha				
500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	500.3.6.5	Advokasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha				
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK				
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.8.2	Penelitian UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)				
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN					
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2	Perikanan Tangkap				
500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.5	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.5.2.14	Kenelayanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3	Perikanan Budidaya				
500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.2	Pengembangan Produk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.4	Industri Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.8	Pengembangan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.18	Pengembangan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.20	Pelayanan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.21	Kemitraan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.23	Investasi dan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.4.24	Informasi dan Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				

500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.6.12 Pengawakan Kapal Pengawas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

500.5.6.13	Sistem Pemantauan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.17	Penyidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7	Karantina Ikan				
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.2	Penahanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.3	Pengasingan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.4	Pengamatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

500.5.7.5	Pengakuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.7.6	Penolakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.7.7	Pemusnahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.5.7.10	Permohonan Sertifikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	500.5.7.11 Pemasukan Formulir	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.14 Surat Perintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.15 Rekomendasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.16 Penutupan Suatu Area	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.5.7.21	Lokasi Karantina	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	500.6 PERTANIAN					
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.6.2	Perlindungan hortikultura				
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.3	Perbenihan Hortikultura				
500.6.3.1	Penilaian Varietas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
500.6.4.1	Basis Data Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.4.2	Pengendalian Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi				
500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.6.5.4	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.6	Pembiayaan Pertanian				
500.6.6.1	Pembiayaan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.7	Pupuk Pestisida				
500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.7.2	Pupuk Anorganik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.7.3	Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian				
500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan				
500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.9.2	Produksi Benih Serealia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.9.4	Kelembagaan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.10	Budidaya Serealia				
500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.10.3	Jagung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.10.4	Serealia Lain	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
500.6.11.1	Kedelai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.12	Tanaman Pangan				
500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan				

500.6.13.1	Padi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.13.4	Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian				
500.6.14.1	Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.14.2	Holtikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.14.3	Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.14.4	Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.15	Mutu dan Standarasi				
500.6.15.1	Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi				
500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.16.2	Investasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.17	Pemasaran Domestik				
500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.20	Diseminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian				
500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
500.6.26.1	Hak Cipta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.3	Hak Paten Biasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.4	Hak Merek	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian				
500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.28	Pelayanan Hukum				
500.6.28.1	Sertifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.29	Karantina Pertanian				

500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.29.2	Karantina Hewan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.6.30	Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.6.31	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.7 PETERNAKAN					
500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan				
500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.7.2.2	Pakan Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.7.2.3	Budidaya Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.7.3	Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.7.4	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8 PERKEBUNAN		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.2	Tanaman Semusim				
500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar				
500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.4	Tanaman Tahunan				
500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.5	Perlindungan Perkebunan				
500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha				
500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.8.8	Evaluasi Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9 PERINDUSTRIAN					
500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama				
500.9.2.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.2.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.3	Promosi Industri				
	500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi				
	500.9.4.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.4.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual				
	500.9.5.1	Industri Manufaktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

500.9.5.2	Industri Agro	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.9.6	Industri Hijau				
500.9.6.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.6.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.12	Standarisasi				
500.9.12.1	Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.12.3	Infrastruktur Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri				
500.9.13.1	Kebijakan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup				
500.9.14.1	Industri Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.14.2	Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.14.3	Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual				
500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.2	Rekomendasi Kegeologian				
500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.2.3	Pertambangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.2.4	Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.2.5	Geosains	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.3	Penelitian Kegeologian				
500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.3.9	Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian				

500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.4.4	Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.4.5	Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi				
500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.5.4	Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13	<u>Bioenergi</u>				
500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13.6	Database Perusahaan Bioenergi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.14	Aneka Energi				
500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15	Konservasi Energi				
500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE				
500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik				
500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan				
500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan				
500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.20	Sertifikasi				
500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				

500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral				
500.10.26.1	Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.12	Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan				

500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.9	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.31	Sarana Litbang				

500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.32	Afiliasi				
500.10.32.1	Proyek Percontohan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.32.4	Penyajian Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan				
500.10.36.1	Energi baru terbarukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11 PERHUBUNGAN					
500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan				
500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan				
500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor				
500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor				
500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.7	Perlengkapan Jalan				
500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.8	Angkutan Penumpang				
500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.8.7	Angkutan perintis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.9	Angkutan Barang				
500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.9.2	Tarif angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.10	Monitoring Operasional				
500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
500.11.11.1	Pedoman Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.11.3	Bimtek PPNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan				
500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.21	Tarif dan Keperintisan				
500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan				
500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam k	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.24	Angkutan Perkotaan				
500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan				
500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan				
500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.28	Pengembangan Keselamatan				
500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan				
500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum				
500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.31	Audit Keselamatan				
500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.11.32	Inspeksi Keselamatan				
500.11.32.1	Pedoman keselamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.33	Parkir				
500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.2	Telekomunikasi				
500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.3	Penyiaran				
500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal				

500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.5	Pengendalian Informatika				
500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.6	e- Government				
500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.7	e- Business				
500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat				
500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika				
500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.10	Keamanan Informasi				
500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.11 Komunikasi Publik					
500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi					
500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.12.2	Informasi Perekonomian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.13 Pengelolaan Media Publik					
500.12.13.1	Media Cetak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.12.13.2	Media Online	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.14	Kemitraan Komunikasi				
500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.15	Infrastruktur Informatika				
500.12.15.1	Jaringan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.15.3	Keamanan Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.16	Sistem dan Data				

500.12.16.1	Portal dan Konten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.12.17	Pusat Kerjasama				
500.12.17.1	Kerja Sama daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				
500.12.18.1	Pelayanan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.18.3	Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.12.19	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata				

	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.2.3	Industri Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata				
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK				
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14 STATISTIK					
500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				
500.14.2.1	Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.3	Survei				
500.14.3.1	Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.3.2	Persiapan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik				
500.14.4.1	Kompilasi Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.4.2	Analisis data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.4.3	Penyusunan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15 KETENAGAKERJAAN					
500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja				
500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.6	Bina Pemagangan				
500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan				
500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja				
500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.8.4	Analisis Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.9	Penempatan T Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
500.15.9.1	Antar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.11	Standardisasi Profesi				
500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi				
500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.12.2	Perjanjian Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial				
500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
500.15.14.1	Pengupahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial				
500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				

500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.20	Bina Penegakan Hukum				
500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.21.2	Hasil kajian, perancangan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16 PENANAMAN MODAL					
500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal				

500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.4	Promosi Penanaman Modal				
500.16.4.1	Pengembangan Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.4.4	Promosi Sektoral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal				
500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.5.2	Kerja Sama Regional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal				
500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.17 PERTANAHAN					

500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan				
500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah				
500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.17.4	Sengketa Tanah				

500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18 TRANSMIGRASI					
500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi				
500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

	500.18.2.4 Advokasi Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi				
	500.18.3.1 Penyiapan Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3.2 Penyiapan Sarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3.3 Penyiapan Prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				
	500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat				
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

500.18.5.4	Pelayanan Investasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				
500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				
500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.8	Pengembangan Usaha				
500.18.8.1	Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.8.2	Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan				
500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.9.2	Pengembangan Sarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.10	Penyerasian Lingkungan				
500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
VII	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
	600.1	PEKERJAAN UMUM				
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air				
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	600.1.2.2	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air				
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.3.2	Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air				
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan				
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Karena akan memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD	Bidang Terkait
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.8	Pembangunan Jalan				

600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.9	Preservasi Jalan				
600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.10	Pengelolaan Jembatan				
600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.10.3	Teknik Jembatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah				
600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol				
	600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman				
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman				
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.14.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan				
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.15.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.16.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman				
600.1.17.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.17.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.2.3	Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan				
600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				
600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan				
600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.5.2	Analisa Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.6	Penyediaan Rumah Susun				
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.6.2	Penyediaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.6.4	Pengelolaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus				
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial				
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

600.2.8.3	Fasilitas Hunian Berimbang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.8.4	Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.9	Investasi Infrastruktur				
600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.9.3	Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	600.2.10.4	Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi				
	600.2.11.1	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi				
600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi				
600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.15.2	Pengembangan Materi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)				
600.2.16.1	Antar Sektor	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.16.2	Antar Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis				

600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan				
600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)					
600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.3.2	Perencanaan				
600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian				

600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.3.4	Pemetaan				
600.3.4.1	Peta Dasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.4 LINGKUNGAN HIDUP					

600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.4	Ekonomi Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.5	Dampak Lingkungan				
600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan				

	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan				
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan				
	600.4.8.1	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.8.2	Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.8.4	Keamanan Hayati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat				
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

600.4.9.2	Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer				
600.4.10.1	Perangkat mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim				
600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				
600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun				
600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3				

	600.4.14.1	Pemantauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	600.4.15	Pengelolaan Sampah				
	600.4.15.1	Pembatasan sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan				
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan				
600.4.18.1	Penyidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.19	Komunikasi Lingkungan				
600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat				
600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat				
600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan				
600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan				

	600.4.23.1	Pengelolaan Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan				
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi				
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
VIII	700	PENGAWASAN				
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL				
	700.1.1	Rencana Pengawasan				
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan				
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat

	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Inspektorat
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
IX	800 KEPEGAWAIAN					
	800.1 SUMBER DAYA MANUSIA					
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai				
	800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.1.3	Mutasi Pegawai				
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.4	Pengembangan Karir				
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara				
800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.6.2	Disiplin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.7	Bantuan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai				
800.1.8.1	Status Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian				

800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian				
800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorrer	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.11	Administrasi Pegawai				
800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.2	Cuti Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

	800.1.11.3 Cuti Bersalin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.4 Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.5 Cuti Alasan Penting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.6 Cuti Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai				
800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.4	Bantuan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.5	Pakaian Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.13	Administrasi Perseorangan				
800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.13.4	Sekretaris Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.14	Penilaian Kompetensi				
800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan				
800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.2.4	Modul-modul diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.3	Widyaiswara				
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat				
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	800.2.5	Alumni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
X	900 KEUANGAN					
	900.1 KEUANGAN DAERAH					
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)				
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	900.1.2	Penyusunan Anggaran				
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3	<u>Pelaksanaan Anggaran</u>				
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.2	Pendapatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.3	Belanja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.7	Daftar Gaji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.8	Kartu Gaji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.3.10	Laporan Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.4	<u>Pinjaman/Hibah Luar Negeri</u>				
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncturan dana)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.10	Staff Appraisal Report	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.11	Report /Laporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.13	Completion Report/ Annual Report	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)				

900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan				
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				
900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				
900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah				
900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
900.1.12	Anggaran Daerah				
900.1.12.1	Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah				
900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan				
900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				

900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

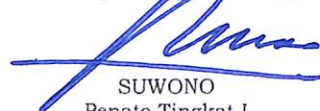
BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Pt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010